

**EVALUASI SISTEM INFORMASI MANAJEMAN DAERAH
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN GOWA**

SKRIPSI

HASTITA NOVI DAMRIS

105730529515



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019**

HALAMAN JUDUL

**EVALUASI SISTEM INFORMASI MANAJEMAN DAERAH
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN GOWA**

SKRIPSI

**HASTITA NOVI DAMRIS
105730529515**

Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi pada Jurusan Akuntansi

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019**

PERSEMBAHAN

مَانِحِلَ وَالِدٌ وَوَلَدٌ أَفْضَلُ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ. (رواه الترمذي)

Artinya :

"Tidaklah ada pemberian dari orang tua kepada anaknya yang lebih utama daripada budi pekerti yang baik". (HR. Tirmidzi)

Kupersembahkan karya ini kepada Ayahanda Damris Rinal dan Ibunda Hasnawati yang telah memberikan dukungan serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan putrinya

MOTTO

Ketika kamu merasa sendirian, ingatkan diri bahwa Allah sedang menjauhkan mereka darimu, agar hanya ada kau dan Allah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat :Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866972

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : " Evaluasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Gowa"
Nama Mahasiswa : Hastita Novi Damris
No. Stambuk/NIM : 105730529515
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan Panitia
Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Sabtu, 24 Agustus 2019 di Ruang IQ
7.1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 24 Agustus 2019

Menyetujui

Pembimbing I,


H. Neldah, SE., M.Si
NIDN: 0902025701

Pembimbing II,


Mutlarni, SE., M.Si
NIDN: 0930087603

Mengetahui

Ketua Program Studi,


Dr. Ismail Badolahi, SE., M.Si., Ak.CA.CSP
NIDN: 1073428



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866972

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama **Haslita Novi Damris**, NIM **105730529515**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor **130/ Tahun 1440 H/2019 M**, Tanggal **24 Agustus 2019 M** sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 23 Dzulhijah 1440 H
24 Agustus 2019 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abdul Rahman SE, MM
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Reaulong, SE., MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji :
 1. Dr. Agus Salim HR, SE., MM
 2. Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si.Ak.CA.CSP
 3. Abdul Salam HB., SE., M.Si.Ak.CA
 4. Faidhul Adzim, SE., Si



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat :Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866972

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hastita Novi Damris
Nim : 105730529515
Program Studi : Akuntansi
Dengan Judul : "Evaluasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Gowa"

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi ini saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 24 Agustus 2019

Membuat Pernyataan,

PEMBAYARAN
Rp 5000
5000

Hastita Novi Damris

Diketahui Oleh:

Ketua Program Studi

Ismail Rasulong, SE,MM
NBM : 963878

Dr. Ismail Badollahi, SE, M.Si, Ak, CA, CSP
NBM : 107 34 28

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbilalamin, Puji dan syukur senantiasa teriring dalam setiap hela nafas atas kehadiran dan junjungan Allah Swt. Bingkisan salam dan shalawat tercurah kepada kekasih Allah, nabiullah muhammad saw, para sahabat dan keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqamah dijalan-Nya.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah. Akhirnya sampai dititik akhir penyelesaian skripsi. Namun semua tak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan serta bantuan moril dan material, maka melalui kesempatan ini peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat :

1. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM., sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengikuti perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, beserta stafnya.
3. Bapak Dr. Ismail Badollahi, SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CSP, Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Hj. Naidah, SE.,M.Si, dan Muttiarni, SE., M.Si, selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga, dalam memberikan arahan, petunjuk dan motivasi kepada peneliti mulai dari penyusunan usulan penelitian hingga selesainya skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Akuntansi yang tidak sempat peneliti ucapkan satu persatu yang telah mendidik, membekali peneliti dengan ilmu pengetahuan dan pemahaman yang tak ternilai selama di bangku kuliah. Hanya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan doa yang setulus-setulusnya yang dapat peneliti berikan. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang berlipat ganda atas segala kebaikan Bapak dan Ibu.
6. Ucapan terima kasih terkhusus peneliti ucapkan kepada kedua orang tuaku tercinta, Damris Rinal dan Hasnawati serta adik-adiku tersayang Daniel Alfiansyah dan Denis Alvia yang selalu memberikan motivasi kepada peneliti dan selalu mendoakan peneliti sehingga dapat menyelesaikan studinya. Karena doa dan motivasi dari kalian yang telah menguatkan peneliti untuk tidak menyerah dan putus asa dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Kepada semua keluargaku terutama keluarga di Bira yang telah memberikan doa dan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
8. Kepada sahabatku Gibah Squad Juspidayanti S.Si, Yulianti Rizal S.Kep, Annisaul Fadhillah Amd.Rad , Lisa Prahayu Amd.Kep , Wirda

Wulandari, Desi Astika, Richa Ristianti Dahman, Indah Cahyani, yang selalu memberikan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini .

9. Kepada sahabat seperjuangan didunia perkoreaan Anyeong Team Kak Nurmisranda S.Pd, Kak Lilis Sulistiyani Siman SE, Kak Andi Musfira, Annisaul Fadhillah Amd. Rad, yang selalu memberikan motivasi dan dorongankesehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini .

10. Kepada sahabat seperjuanganku Novi Triyanti, Nurfauziah, Nurul Fitriana, Feby Novianti yang selalu memberikan motivasi dan dorongan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.

11. Kepada semua pihak yang tidak sempat saya sebutkan namanya, namun telah membantu peneliti dalam penyelesaian studi.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan informasi bagi pembaca, dan semoga kebaikan dan keikhlasan serta bantuan dari semua pihak bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Amin.

Makassar, 24 Agustus 2019

Penulis

ABSTRAK

HASTITA NOVI DAMRIS, Tahun 2019 Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) untuk Pengelolaan Keuangan pada BAPPEDA Gowa, Skripsi Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Hj. Naidah dan Pembimbing II Muttiarni

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Hasil Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Gowa telah dijalankan secara efektif. Penelitian ini diperoleh dari kuesioner (primer) dan beberapa observasi dan wawancara dengan pihak terkait, jenis penelitian ini bersifat Kualitatif Deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologi. Memilih beberapa informan dengan snowball sampling dan purposif sampling. Sumber data yang digunakan adalah sumber primer yaitu informasi yang bersumber dari pengamatan langsung ke lokasi penelitian dengan cara observasi dan wawancara. Sedangkan sumber sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi atau studi kepustakaan untuk melengkapi data-data primer. Pengumpulan data dilakukan melalui field research melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum pegawai BAPPEDA sudah memahami makna SIMDA keuangan serta gambaran pelaksanaannya yang berkaitan dengan input dan output datanya. SIMDA Keuangan memudahkan proses penyusunan laporan keuangan. Faktor-faktor yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan penerapan SIMDA keuangan yaitu komunikasi, sumberdaya manusia, sikap/disposisi, dan struktur birokrasi.

Kata kunci : Simda Keuangan, Penerapan.

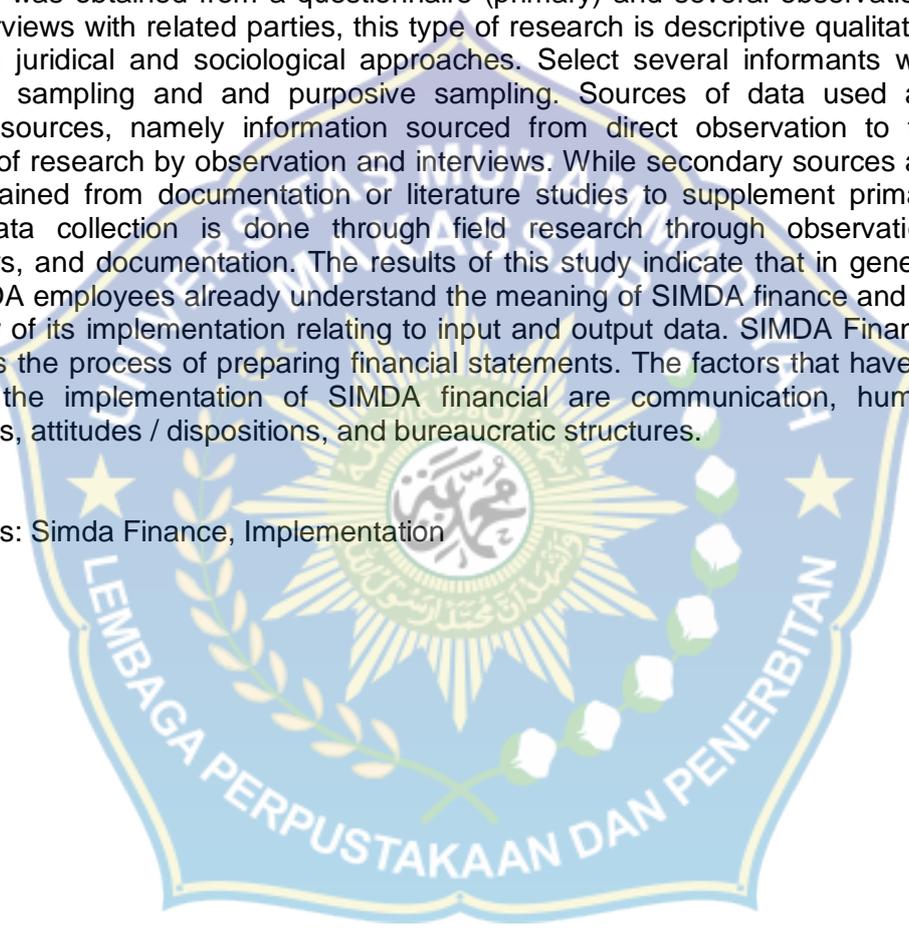


ABSTRACT

HASTITA NOVI DAMRIS, Year 2019 Application of Regional Management Information Systems (SIMDA) for Financial Management at Gowa BAPPEDA, Thesis Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Guided by Advisor I Hj. Muttiarni Naidah and Counselor

This study aims to determine how the results of the application of the Regional Management Information System (SIMDA) at the Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) of Gowa have been carried out effectively. This research was obtained from a questionnaire (primary) and several observations and interviews with related parties, this type of research is descriptive qualitative by using juridical and sociological approaches. Select several informants with snowball sampling and purposive sampling. Sources of data used are primary sources, namely information sourced from direct observation to the location of research by observation and interviews. While secondary sources are data obtained from documentation or literature studies to supplement primary data. Data collection is done through field research through observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that in general BAPPEDA employees already understand the meaning of SIMDA finance and an overview of its implementation relating to input and output data. SIMDA Finance facilitates the process of preparing financial statements. The factors that have to support the implementation of SIMDA financial are communication, human resources, attitudes / dispositions, and bureaucratic structures.

Keywords: Simda Finance, Implementation



DAFTAR ISI

| | |
|--|----------|
| SAMPUL..... | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| SURAT PERNYATAAN | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| ABSTRAK BAHASA INDONESIA | x |
| ABSTRACT | xi |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| DAFTAR TABEL..... | xv |
| DAFTAR GAMBAR | xv |
| | xv |
| i | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 3 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 4 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 4 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 5 |
| A. Tinjauan Teori | 5 |
| 1. Efektivitas..... | 5 |
| 2. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) | 6 |
| a. Pengertian Sistem Informasi Manajemen | 6 |
| b. Manfaat dan kualitas informasi..... | 8 |
| c. Sistem Informasi Daerah | 11 |
| d. Tujuan & Manfaat SIMDA | 12 |

| | |
|--|-----------|
| e. Klasifikasi SIMDA | 13 |
| f. Unsur SIMDA | 14 |
| g. Aplikasi SIMDA Keuangan | 15 |
| 3. Teori Implementasi Kebijakan | 22 |
| 4. Nilai-nilai Pendukung Implementasi Kebijakan | 27 |
| 5. Pelaporan Keuangan | 27 |
| 6. Hubungan antara SIMDA dengan Pengelolaan Keuangan | 30 |
| B. Tinjauan Empiris | 32 |
| C. Kerangka Konsep | 39 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 40 |
| A. Jenis Penelitian | 40 |
| B. Fokus Penelitian | 40 |
| C. Lokasi dan Waktu Penelitian | 40 |
| D. Sumber Data | 41 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 41 |
| F. Instrumen Penelitian | 42 |
| G. Metode Analisis | 42 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 45 |
| A. Gambaran Umum Objek Penelitian | 45 |
| 1. Profil BAPPEDA Kabupaten Gowa | 45 |
| 2. Visi Misi BAPPEDA | 46 |
| 3. Struktur Organisasi & Job Description | 47 |
| B. Hasil dan Pembahasan | 57 |
| 1. Laporan Keuangan BAPPEDA Kabupaten Gowa | 60 |
| 2. Pemahaman SIMDA Keuangan | 67 |

| | |
|--|-----------|
| 3. Faktor-faktor pendukung yang dimiliki oleh BAPPEDA Gowa dalam penerapan SIMDA Keuangan..... | 70 |
| 4. Kualitas informasi penerapan SIMDA Keuangan..... | 76 |
| 5. Efektivitas Penerapan SIMDA Keuangan..... | 78 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... | 79 |
| A. Kesimpulan | 79 |
| B. Saran | 79 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu | 35 |
| Tabel 4.1 Data pegawai berdasarkan golongan | 54 |
| Tabel 4.2 Data pegawai berdasarkan pendidikan | 55 |
| Tabel 4.3 Laporan Realisasi Anggaran | 58 |
| Tabel 4.4 Neraca | 59 |
| Tabel 4.5 Laporan Operasional..... | 61 |
| Tabel 4.6 Laporan Perubahan Ekuitas | 62 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|-------------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Konsep..... | 39 |
| Gambar 4.1 Struktur Organisasi..... | 46 |



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan pada setiap entitas baik pemerintah maupun swasta sehingga mewajibkan entitas untuk menciptakan laporan keuangan yang baik. Dalam menciptakan laporan keuangan yang baik maka dibutuhkan perangkat untuk membantu dalam membuat laporan keuangan tersebut. Pengelolaan keuangan di entitas pemerintahan adalah SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah).

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) mulai dibentuk pada tahun 2003 yang dirancang oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Daerah (BPKP) yang merupakan suatu sistem informasi yang dibangun, dikembangkan dan digunakan untuk melakukan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja. Pemerintahan daerah beserta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (PA) diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Program aplikasi SIMDA ini telah diperkenalkan dan mulai diberlakukan pada tanggal 29 Agustus 2006 yang sejalan dengan Departemen Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tujuan dari penerapan SIMDA ini adalah untuk menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan secara tepat waktu, lengkap akurat dan dapat

diandalkan sesuai ketentuan yang berlaku serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik pada umumnya dan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dengan menyediakan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi pada khususnya. Melihat dari tujuan SIMDA maka ini bisa membuat efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Efektifitas penerapan SIMDA merupakan hasil yang di peroleh dari suatu instansi mencerminkan sejauh mana instansi tersebut mampu menghasilkan laporan keuangan secara tepat waktu, lengkap, akurat dan dapat diandalkan sesuai ketentuan yang berlaku serta mendorong terwujudnya pemerintah yang baik dan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan meyalurkan informasi keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan Mitami Dian M (2013), dengan judul Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada Pemerintah daerah Kabupaten Pangkep. Metode yang digunakan yaitu kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah secara umum pegawai DPKAD Pangkep sudah memahami makna Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan secara umum, yaitu sistem komputerisasi akuntansi yang diperuntukan untuk pemerintah daerah untuk mengelola laporan keuangan pemerintah daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan salah satu tempat yang menerapkan aplikasi SIMDA. Di tempat ini adalah tempat keluar masuknya uang pada kabupaten Gowa yang mengatur pengelolaan keuangan

diinstansi tersebut itu secara baik . Dari uraian tersebut sehingga penulis mengambil judul “ Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Untuk Pengelolaan Keuangan Pada BAPPEDA Gowa”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Hasil Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam Pengelolaan Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Gowa telah dijalankan secara efektif?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Hasil Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam Pengelolaan Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Gowa telah dijalankan secara efektif.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, yaitu berupa teori efektifitas penerapan system informasi manajemen daerah (SIMDA) untuk pengelolaan keuangan pada pemerintah Gowa. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan gambaran bagaimana penerapan system

informasi manajemen daerah dalam pengelolaan keuangan apakah sudah dijalankan secara efektif.

2. Manfaat praktis.

Penelitian ini akan memberikan manfaat kepada praktisi khususnya para staff atau pegawai pengelolaan keuangan, yaitu untuk mengetahui penerapan system informasi manajemen daerah untuk pengelolaan keuangan di jalankan secara efektif. Bagi pihak lain, penelitian ini akan menjadi bahan referensi terkait dengan konsep efektifitas penerapan system informasi manajemen daerah (SIMDA) untuk pengelolaan keuangan pada pemerintah Kabupaten Gowa.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

Aplikasi SIMDA telah diperkenalkan dan mulai diberlakukan pada tanggal 29 Agustus 2006 yang sejalan dengan Departemen Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dimana pada bagian ketiga Azas Umum Pengelolaan Keuangan daerah Pasal 4 Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Sebagaimana berkaitan dengan rumusan masalah pada penelitian ini efektif dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

1. Efektivitas

Efektivitas menurut Keban (2010:4) mengatakan bahwa suatu organisasi dapat dikatakan efektif kalau tujuan organisasi atau nilai-nilai sebagaimana ditetapkan dalam visi tercapai. Efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok, dan organisasi. Semakin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan (standar), maka mereka dinilai semakin efektif, Gibson (Bungkaes 2013:46).

Menurut P.Robbins Stephen (2010:8) efektifitas adalah menjalankan aktivitas-aktivitas yang secara langsung membantu organisasi mencapai berbagai

sasaran. Efektivitas adalah mengerjakan sesuatu yang benar. Sesuatu organisasi barangkali bisa efisien tetapi tidak efektif dalam pendekatan pencapaian tujuan organisasi. Semakin dekat organisasi ketujuannya, maka semakin efektif organisasi tersebut, Ahady (2010:3).

Menurut Makmur (2011 : 5) mengungkapkan efektivitas berhubungan dengan tingkat kebenaran atau keberhasilan dan kesalahan. Ia berpendapat bahwa untuk menentukan tingkat efektivitas keberhasilan seseorang, kelompok, organisasi bahkan sampai kepada negara kita harus melakukan perbandingan antara kebenaran atau ketepatan dengan kekeliruan atau yang dilakukan. Semakin rendah tingkat kekeliruan atau kesalahan yang terjadi, tentunya akan semakin mendekati ketepatan dalam pelaksanaan setiap aktivitas atau pekerjaan (tugas) yang dibebankan setiap orang.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menilai tingkat efektivitas dapat digunakan perbandingan antara rencana awal dengan hasil kenyataan yang didapat. Semakin tinggi tingkat kesalahan atau kekeliruan daripada rencana awal maka semakin tidak efektif. Hasil akhir adalah tujuan utama. Semakin mencapai target yang ditentukan maka efektivitasnya semakin baik

2. Sistem Informasi Manajemen Daerah

a. Pengertian Sistem Informasi Manajemen.

Sistem informasi manajemen dibentuk oleh tiga kata, yaitu sistem, informasi dan manajemen. Menurut Romney dan Teinbert (2015:3), sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling

berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Bambang Hertono (2013: 15) mendefinisikan informasi adalah data yang telah ditafsirkan agar memberikan makna tertentu bagi seseorang. Manajemen didefinisikan oleh Nugroho (2010:58) sebagai “suatu tim yang disusun dalam organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh suatu organisasi”.

Menurut Davis (2010: 3) sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu (intergrated) untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Sedangkan menurut Rochaety, dkk (2012) “system informasi manajemen merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengolah, dan mengambil kembali data dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan sebuah perusahaan”. Machud, Rizan (2013) system informasi manajemen merupakan suatu system yang dapat membantu manajemen didalam pengumpulan data, pengelolaan serta analisis evaluasi data dan menyajikan kedalam batas informasi yang bernilai dan akhirnya sampai pada pengambilan keputusan dimana informasi ini berguna untuk mendukung fungsi operasi manajemen.

Menurut Bambang Hartono (2014:20) “system informasi manajemen adalah sebuah system, yaitu rangkaian yang terorganisasi dari sejumlah bagian atau komponen yang secara bersama-sama berfungsi atau bergerak menghasilkan informasi untuk digunakan dalam manajemen perusahaan”.

Menurut Raymond Mc Leod (2014 : 94-95) “system informasi manajemen didefinisikan sebagai suatu system berbasis computer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai yang mempunyai kebutuhan serupa. Informasi menjelaskan perusahaan atau salah satu system utamanya mengenai apa yang telah terjadi pada masa lalu, yang sedang terjadi sekarang, dan yang mungkin terjadi pada masa depan. Informasi tersebut tersedia dalam bentuk laporan periodik, laporan khusus, dan output dari simulasi matematika. Informasi digunakan oleh pengelola ataupun staf lainnya pada saat mereka membuat keputusan untuk memecahkan masalah”.

Dari beberapa definisi para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen yaitu sebuah sistem manusia dari rangkaian beberapa komponen-komponen yang saling berhubungan yang didalamnya mengumpulkan, mengolah dan memilih data untuk mencapai suatu tujuan.

b. Manfaat dan Kualitas Informasi

Manfaat Informasi

Informasi itu sangat beragam, baik dalam jenis, tingkatan maupun bentuknya. Manfaat informasi bagi setiap orang berbeda-beda. Adapun manfaat dari informasi menurut Sutanta (2003: 11) adalah :

1. Menambah pengetahuan Adanya informasi akan menambah pengetahuan bagi penerima yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan yang mendukung proses pengambilan keputusan.

2. Mengurangi ketidakpastian pemakai informasi Informasi akan mengurangi ketidakpastian karena apa yang akan terjadi dapat diketahui sebelumnya, sehingga kemungkinan menghindari keraguan pada saat pengambilan keputusan.

3. Mengurangi resiko kegagalan Adanya informasi akan mengurangi resiko kegagalan karena apa yang akan terjadi dapat diantisipasi dengan baik, sehingga kemungkinan terjadinya kegagalan akan dapat dikurangi dengan pengambilan keputusan yang tepat.

4. Mengurangi keanekaragaman yang tidak diperlukan Mengurangi keanekaragaman yang tidak diperlukan akan menghasilkan keputusan yang lebih terarah.

5. Memberikan standar, aturan-aturan, ukuran-ukuran, dan keputusan untuk menentukan pencapaian, sasaran dan tujuan.

Kualitas Informasi

Nilai informasi ditentukan oleh banyak hal, diantaranya adalah dengan melihat kualitas informasi yang dihasilkan. Menurut Agus Mulyanto (2010) bahwa mengukur kualitas informasi dapat dilakukan dengan menggunakan tiga macam karakteristik, yaitu:

a. Akurasi

Menurut Agus Mulyanto (2010) informasi dikatakan akurat yaitu informasi harus jelas mencerminkan maksud yang disampaikan dan harus bebas dari kesalahan-kesalahan.

Sebuah informasi dapat dikatakan akurat jika informasi tersebut tidak bisa atau menyesatkan, bebas dari kesalahan-kesalahan dan harus jelas mencerminkan maksudnya,. Ketidak akuratan sebuah informasi dapat terjadi karena sumber informasi atau data mangalami gangguan atau kesengajaan sehigga merusak atau merubah data-data asli tersebut.

b. Ketepatan waktu

Menurut Agus Mulyanto (2010) informasi yang dihasilkan dari suatu pross pengolahan data, datangnya tidak boleh terlambat (using). Informasi yang terlambat tidak akan mempunyai nilai yang baik, karena informasi merupakan landasan dalam pengambilan keputusan. Kesalahan dalam pengambilan keputusan akan berakibat fatal bagi organisasi.

c. Relevan

Menurut Agus Mulyanto (2010) informasi dikatakan berkualitas jika relevan bagi pemakainya. Informasi akan relevan jika memberikan manfaat bagi pemakainya.

c. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah mempengaruhi system pengolahan data dan system informasi pada entitas yang melakukan pelaporan data keuangan. Untuk dapat melakukan pengelolaan data keuangan secara efektif dan efisien maka dibutuhkan suatu

sistem informasi terintegrasi secara menyeluruh dan mampu memberikan informasi yang handal dan relevan.

Menurut Andini Kusuma Dewi (2014), SIMDA merupakan sebuah sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi bagi penyelenggara fungsi utama dan penunjang bagi pemerintah daerah yang terintegrasi secara baik. Menurut Darea (2015) SIMDA merupakan salah satu upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, tepat, lengkap, akurat, dan terpadu, untuk menunjang proses administrasi pemerintah, pelayanan masyarakat, dan memfasilitasi partisipasi dan dialog public dalam perumusan kebijakan.

Aplikasi sistem informasi manajemen daerah merupakan program aplikasi computer yang terintegrasi dan dapat membantu proses administrasi pemerintah daerah dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai tingkat kecamatan dan kelurahan . SIMDA terdiri dari 26 aplikasi terpisah yang dapat didistribusikan disetiap SKPD dengan system database terintegrasi, sehingga outputnya dapat dipergunakan oleh pimpinan daerah untuk membantu proses pengambilan keputusan. Disisi lain pihak legislative dapat menggunakannya untuk melakukan monitoring terhadap kinerja pemerintah daerah. SIMDA merupakan salah satu upaya dalam ragka memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, tepat, lengkap, akurat dan terpadu untuk menunjang proses administrasi pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan memfasilitasi partisipasi dan dialog public dalam perumusan kebijakan.

d. Tujuan Dan Manfaat SIMDA

Tujuan diterapkannya aplikasi SIMDA (BPKP,2008) adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai tempat tukar menukar informasi bagi setiap unit kerja sama penerima koneksitas jaringan SIMDA.
- b. Sebagai alat komunikasi langsung dengan menggunakan webcam bagi unit kerja penerima koneksitas jaringan SIMDA.
- c. Sebagai salah satu media control bagi realisasi kegiatan, baik capaian fisik maupun penyerapan dananya.
- d. sebagai media awal bagi pelaksanaan e-government.
- e. sebagai sarana untuk pelaksanaan good government.

Manfaat yang diperoleh oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sistem aplikasi SIMDA keuangan daerah terintegrasi BPKP (2008) adalah sebagai berikut :

- a. Database terpadu,tidak perlu input berulang-ulang data yang sama.
- b. Data yang sama akan tercek dan recek secara otomatis (validasi data terjamin)
- c. Fleksibel, dapat menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan dimana :

1. Output dapat disesuaikan menurut perundang-undangan yang berlaku, dan
2. Output dapat diajikan berdasarka kebutuhan manajemen pemerintah daerah untuk mengambil keputusan/kebijakan.

e. Klasifikasi SIMDA

SIMDA dapat diklasifikasikan dalam tiga tingkatan menurut BPKP (2008) yaitu :

- a. Sistem Informasi eksekutif sebagai pendukung pimpinan daerah dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan.
- b. Sistem Informasi fungsional bagi para pimpinan dinas/ badan/ lembaga sebagai pendukung informasi operasional strategis pimpinan daerah
- c. Sistem Informasi operasional sebagai penunjang tugas pokok masing-masing dinas/lembaga.

f. Unsur SIMDA

Kerangka arsitektur SIMDA terdiri dari empat lapis struktur

BPKP (2008) yaitu sebagai berikut :

- a. Akses, jaringan telekomunikasi, jaringan internet , dan media komunikasi, lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses situs pelayanan public.
- b. Portal, pelayanan public, situs web pemerintah pada internet penyedia layanan public tertentu yang mengintegrasikan proses pengolahan dan pengelolaan informasi dan dokumen elektronik di sejumlah instansi yang terkait.
- c. Organisasi pengolahan informasi organisasi pendukung yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik, dan

d. Infrastruktur dan aplikasi dasar semua prasarana, baik terbentuk perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi dan penyaluran informasi.

g. Aplikasi Sistem Informasi Daerah (SIMDA) Keuangan.

Program aplikasi computer SIMDA keuangan adalah suatu program aplikasi yang ditujukan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Dengan aplikasi ini, pemda dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, dimulai dari penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi dan pelaporannya. (Miami, 2013).

a). Perkembangan SIMDA Keuangan.

SIMDA Keuangan mengalami tiga tahapan perubahan, yaitu :

1. SIMDA Ver. 1.0.

Aplikasi SIMDA Ver.1.0 ini merupakan pengelolaan keuangan yang pertama kali dikembangkan oleh BPKP, yaitu pada tahun 2003. Aplikasi ini dikembangkan mengacu pada Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 mengenai pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran dan belanja daerah, dan draft system akuntansi pemerintah yang sedang tahap pengembangan saat itu. System ini dipakai sampai dengan tahun 2004 dan berhasil diaplikasikan pada Sembilan pemerintahan daerah.

2. SIMDA Ver.2.0.

Aplikasi SIMDA Ver. 2.0 merupakan penyempurnaan dari versi sebelumnya akibat adanya perubahan akibat adanya perubahan dan penambahan acuan peraturan yang mendasarinya, yaitu Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, PP No. 24 Tahun 2005 mengenai Standar akuntansi Pemerintah, dan PP No. 58 tahun 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah. System ini mulai diaplikasikan sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang. System ini berhasil diimplementasikan di 28 pemerintah daerah.

3. SIMDA Ver. 2.1.

SIMDA ini sendiri merupakan system informasi versi paling update yang telah berhasil dikembangkan oleh BPKP akibat adanya perubahan acuan peraturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu PP No. 24 tahun 2005, PP No. 58 tahun 2005, PP No. 8 tahun 2006 mengenai pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, dan permendagri no. 13 tahun 2006 mengenai Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah. System ini mulai dipublikasikan sejak tahun 2007 mengenai perubahan atas permendagri No. 13 tahun 2006.

b). Output yang dihasilkan.

Output yang dihasilkan dari SIMDA keuangan BPKP (2008) adalah :

1. Penganggaran.

a. Rencana Kerja Anggaran (RKA).

b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

c. Surat Penyediaan Dana (SPD).

2. Penatausahaan .

a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

b. Surat Perintah Membayar (SPM).

c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

d. Surat Tanda Setoran (STS).

e. Register

f. Surat pengendalian lainnya.

3. Akuntansi dan Pelaporan.

a. Jurnal.

b. Buku besar.

c. Buku pembantu.

d. Laporan Realisasi Anggaran.

e. Laporan arus kas.

f. Neraca.

4. Program Aplikasi SIMDA Keuangan didukung dengan :

a. buku manual system dan prosedur penganggaran.

b. buku manual system dan prosedur penatausahaan

c. buku manual system dan prosedur akuntansi dan pelaporan

d. buku pedoman pengoperasian aplikasi SIMDA keuangan.

c). Fungsi Program Aplikasi SIMDA Keuangan.

Fungsi utama pengimplementasian SIMDA keuangan adalah :

1. Membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah (penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban).
2. Menyusun laporan keuangan lebih efisien dan akurat.
3. Menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya.
4. Menyajikan informasi yang akurat secara efektif dan efisien yang akan digunakan oleh pengguna laporan
5. Mempermudah proses audit bagi auditor dengan merubah tata cara audit manual menjadi Electronic Data Processing (EDP) audit.

d). Keunggulan dan Manfaat SIMDA Keuangan.

Keunggulan atau nilai tambah yang ditawarkan oleh SIMDA keunggulan adalah :

1. Output /Laporan disesuaikan peraturan yang berlaku dan fleksibel, dapat menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan.
2. Berbasis windows
3. Validasi Inputam data lebih terjamin
4. Terdapat menuotoritas dan unit otoritas
5. Memfasilitasi setiap fungsi pengelolaan keuangan daerah dengan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sekaligus melakukan pencatatan akuntansi
6. Memfasilitas akuntansi pengguna anggaran.

Selain manfaat dibidang pengelolaan keuangan daerah, berikut adalah manfaat lain yang terintegrasi dalam pemanfaatan SIMDA , diantaranya :

1. Sesuai Peraturan.

Dengan menerapkan aplikasi SIMDA Keuangan sebagai sebuah system informasi pengelolaan keuangan, pemerintah daerah secara otomatis telah melaksanakan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan pengelolaan keuangan daerah karena SIMDA keuangan dikembangkan atas dasar kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

2. Kesenambungan Maintenance.

Dengan lokasi BPKP yang ada disetiap ibukota propinsi, maka pemeliharaan system dapat dilakukan secara berkesinambungan dan optimal.

3. Transfer of Knowledge.

Poin yang paling penting dari penerapan system ini adalah adanya transfer pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan daerah bagi aparat daerah setempat, tidak hanya masalah operasional system saja. Selain itu, proses asistensi yang dilaksanakan oleh BPKP dalam kaitannya dengan penerapan splikasi SIMDA disuatu daerah diorientasikan "satu kali untuk selamanya"

4. Terintegrasi.

SIMDA merupakan program aplikasi keuangan daerah yang telah mengintegrasikan empat tahapan pengelenggaraan keuangan daerah, penganggaran,

perubahan anggaran, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. SIMDA juga mengintegrasikan antara proses transaksi keuangan yang terjadi dengan proses penjumlahannya secara otomatis. Sehingga, setiap transaksi keuangan yang terjadi, dapat langsung dilihat jurnal atas transaksi tersebut hingga pelaporannya pada waktu yang bersamaan.

e). Pembiayaan Penerapan SIMDA Keuangan.

Biaya yang dikenakan terhadap atas program aplikasi SIMDA ini dapat dikatakan gratis atau tanpa biaya. Jika dibandingkan dengan program aplikasinya, biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah dapat mencapai ratusan juta hingga milyaran, tergantung pada jumlah computer pengguna yang ingin dipasang program tersebut. Hal inilah yang membuat SIMDA menjadi pilihan utama sebagai pemerintah daerah di Indonesia untuk dijadikan sebagai basis system informasi keuangannya.

Pembiayaan yang dikeluarkan untuk penerapan SIMDA, hanya dibutuhkan untuk alokasi tenaga asistensi dan proses-proses pelatihan yang nantinya bermanfaat bagi pemerintah daerah itu sendiri. Besaran jumlah dana yang dibutuhkan untuk proses asistensi implementasi ataupun pendidikan dan pelatihan SIMDA ini, bergantung pada kebutuhan dan kemampuan masing-masing

pemerintah daerah. Artinya, setiap pemerintah daerah tidak akan dibebankan biaya yang melampaui kemampuan keuangannya.

f). Sumber daya Manusia.

Dalam proses implementasi SIMDA, dalam kaitannya dengan ketersediaan SDM pendukung program aplikasi tersebut berjalan lancar, diperlukan adanya penyediaan kebutuhan SDM, baik dari pihak BPKP maupun pihak pemerintah daerah sebagai counterpart. BPKP menyediakan satu tim asistensi SIMDA, yang terdiri dari penanggung jawab, pembantu penanggungjawab, pengendali teknis, ketua tim dan beberapa anggota tim (tergantung pada besar kecilnya pemerintahan daerah yang ditangani). Sementara pihak pemerintah daerah mengerahkan SDM dengan level yang sama, ditambah tenaga administrator dan timnya, serta seluruh pengguna SIMDA (khususnya bendahara) pada level Satker. Khusus untuk administrator database SIMDA, harus memiliki prasyarat antara lain, mahir dalam menggunakan computer, program database, memahami pentingnya pengamanan data dan antusiasme tinggi untuk mempelajari system informasi teknologi.

Proses transfer knowledge dilakukan dengan metode yang berbeda bagi masing-masing tipe counterpart. Metode tandem atau pendampingan digunakan untuk mendidik dan melatih administrator database. Metode ini adalah suatu cara mengenali secara dalam dari business process program aplikasi SIMDA Keuangan bagi

administrator dengan cara menerima dan melaksanakan instruksi dari personil tim asistensi yang ditunjuk, dan berdiskusi interaktif jika terdapat permasalahan, khususnya troubleshooting. Metode pendidikan dan pelatihan (diklat) SIMDA Keuangan merupakan metode penyaluran pengetahuan tentang penggunaan SIMDA Keuangan bagi bendahara dan pengguna dari level Satuan Kerja (Satker). Diklat ini dibagi menjadi 4 tingkat, yaitu penganggaran, perubahan anggaran, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban.

3. Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan Agustino (2008:195).

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi SIMDA keuangan mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Edward (2014:62-70) yaitu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable yaitu komunikasi (communications), Sumber daya (resource), sikap (diposition) dan struktur birokrasi (bureaucratic structure)". Keempat variable tersebut dilaksanakan secara simulta karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat.

a. komunikasi

Menurut Edward (2014:62) komunikasi merupakan faktor yang menunjukkan peranan sebagai acuan agar pelaksanaan kebijakan mengetahui persis apa yang akan mereka kerjakan.

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Sumber informasi yang berbeda dapat melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah sebuah implementasi dapat terlaksana.

Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua perorangan dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan dari sebuah kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya implementor tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implementor kebijakan akan bingung dengan apa yang akan dilakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal.

b. sumber Daya Manusia

Menurut Edward (2014:66) sumber daya yang penting melalui staff dalam ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang cukup dan relevan tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat didalam implementasi, kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagai dimaksudkan.

Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Komponen sumber daya meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan, serta cukup untuk menerapkan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan kebijakan, adanya wewenang yang menjamin bahwa kebijakan dapat diarahkan sebagaimana yang diharapkan serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat diapakai untuk melakukan kegiatan seperti dana dan sarana presarana. Sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya kebijakan secara sempurna serta tidak mampu melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas, maka hal yang harus dilakukan adalah meningkatkan kemampuan/keterampilan para pelaksana untuk melakukan penerapan kebijakan. Untuk itu, perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerjanya. Informasi merupakan sumber daya lainnya yang penting bagi pelaksana kebijakan. Terdapat dua bentuk bentuk informasi, yaitu :

- a. Informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan, dan
- b. Informasi tentang data pendukung kepada peraturan pemerintah dan undang-undang.

Selain SDM dan informasi, sumber daya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana kebijakan dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor serta fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan seperti kantor, dan peralatan.

c. disposisi atau sikap

Menurut Edward (2014:68) Sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai studi implementasi kebijakan public. Jika implementasi kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kecapabilitas untuk melaksanakannya tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk meaksanakan kebijakan tersebut.

Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokrasi. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka sebuah kebijakan akan dapat dijalankan dengan baik seperti apa yang diinginkan

oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d. Struktur Birokrasi

Menurut Edward (2014:70) struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakna. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standar operating prosedurs atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak, struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks serta menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

4. Nilai-nilai Pendukung Implementasi Kebijakan

Penerapan kebijakan harus didukung oleh nilai-nilai dari aparatur oelksana kebijakan, sehingga penerapan kebijakan dapat berjalan efektif. Nilai-nilai pendukung yang hendaknya dimiliki oleh BAPPEDA Kabupaten Gowa sebagai aparatur pelaksana kebijakan adalah sebagai berikut:

1. integritas
2. profesionalisme
3. sinergi

4. pelayanan

5. kesempurnaan

5. Pelaporan Keuangan

Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara ditinjau dari sisi keilmuan ekonomi manajemen disebut sebagai manajemen keuangan public (*public finance of public financial management*). Berdasarkan literature tentang public financial management, masalah utama dalam pengelolaan keuangan negara mencakup masalah, antara lain:

1. Akuntansi (Accounting).
2. Anggaran (bidgeting).
3. Pengendalian /pengadaan (controlling/purchasing).
4. Auditing/pemeriksaan/pengawasan (auditing).

Keempat masalah utama tersebut bila dikelola dengan baik maka akan dicapai suatu sistem pengelolaan keuangan yang lebih populer dengan istilah sistem pengelolaan keuangan public atau pemerintah yang transparan dan akuntabel. Halim & Kusufi (2014:180).

Menurut Balderton (2011:21), istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa “pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-

fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien”.

Menurut Munawir (2010:5), pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi serta laporan perubahan ekuitas. Neraca menunjukkan/ menggambarkan jumlah aset, kewajiban dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Sedangkan, perhitungan (laporan) laba rugi memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta beban yang terjadi selama periode tertentu, dan laporan perubahan ekuitas menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan ekuitas perusahaan.

Menurut Kasmir (2013: 7) dalam pengertian yang sederhana, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Maksud laporan keuangan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan saat ini adalah keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (untuk neraca) dan periode tertentu (untuk laporan laba rugi). Laporan keuangan menggambarkan posisi keuangan perusahaan yang diperoleh dalam suatu periode.

Menurut Widjaja (2014: 152-153), ketentuan tentang pokok-pokok keuangan daerah diatur dengan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan daerah tersebut mengatur tentang:

1. Kerangka dan garis besar prosedur penyusunan APBD
2. Kewenangan keuangan kepala daerah dan DPRD

3. Prinsip-prinsip pengelolaan kas
4. Prinsip-prinsip pengelolaan pengeluaran daerah yang telah dianggarkan
5. Tata cara pengadaan barang dan jasa
6. Prosedur melakukan pinjaman daerah
7. Prosedur pertanggungjawaban keuangan.
8. Dan hal-hal lain yang ,menyangkut pengelolaan keuangan daerah.

Peraturan pemerintah Nomor 105 tahun 2000, tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah pada pasal 38, menyebutkan sbb: “kepala daerah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri atas:

1. Laporan perhitungan APBD
2. Nota perhitungan APBD
3. Laporan aliran kas
4. Neraca Daerah

Pada bagian penjelasan disebutkan sebagai berikut: “nota perhitungan APBD memuat ringkasan pendapatan daerah dan pembiayaan serta kinerja keuangan daerah mencakup antara lain:

1. Kinerja daerah dalam rangka pelaksanaan program yang direncanakan dalam APBD tahun anggaran yang berkenaan.
2. Kinerja pelayanan yang dicapai.
3. Bagian belanja APBD yang digunakan untuk membiayai administrasi umum, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta belanja modal/pembangunan untuk aparatur daerah dan pelayanan public.

4. Bagian belanja APBD yang digunakan untuk anggaran DPRD termasuk sekretariat DPRD.

5. Posisi dana cadangan.

6. Hubungan antara SIMDA dengan pengelolaan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan wujud pertanggungjawaban keuangan daerah dan merupakan tanggungjawab atas akuntabilitas public serta merupakan salah satu ukuran keberhasilan (kinerja) pemerintah daerah. Laporan keuangan yang disaikan oleh pemerintah harus berkualitas, yakni yang memenuhi karakteristik kualitatif yaitu anddal, relevan, dapat dibandingkan dan dapat dipercaya (Cipmawati Mohune, 2013). Dalam Penjelasan PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindak lanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik.

Dengan kemajuan teknologi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat. Manfaat lain yang ditawarkan dalam pemanfaatan teknologi adalah kecepatan dalam pemrosesan informasi (Dian Tri Anggraeni dan Akhmad Ridwan, 2014). Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) merupakan salah satu bentuk pemanfaatan

teknologi informasi dipemerintah daerah. Oleh karena itu dengan adanya Sistem Informasi Manajemen daerah (SIMDA) ini akan membantu pemerintah memepercepat proses pengolahan data dan penyajian laporan keuangan, agar laporan keuangan yang disajikan tepat waktu dan andal. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dengan Kualitas Laporan Keuangan.

Menurut Etin Indrayani dan Gatningsih (2013: 187) mengemukakan bahwa "Pemerintah daerah memerlukan sistem yang dapat menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya lebih konfrensif yang meliputi mengenai posisi keuangan daerah, kondisi kinerja keuangan dan akuntabilitas pemerintah daerah.

Dalam pernyataan Etin dan Gatningsih diatas dapat disimpulkan bahwa SIMDA dibutuhkan oleh pemerintah untuk menghasilkan laporan keuangan yang telah komprehensif, laporan yang komprehensif merupakan kemampuan atau kesiapan untuk menyusun laporan keuangan yang lebih luas, maka dari itu laporan keuangan yang komprehensif harus dibuat secara handal. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara SIMDA dan laporan keuangan . hasil penelitian Cipmawati Mohune (2013) menyetakan bahwa SIMDA mempunyai pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin baik penerapan SIMDA dalam pelaporan keuangan maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah juga akan semakin baik pula.

B. Tinjauan Empiris

Penelitian yang dilakukan Erwin (2016), dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan daerah (SIMDA), system pengendalian intern, kompetensi aparatur dan kataatan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di wiliayah Maluku utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan system informasi manajemen keuangan daerah (SIMDA), system pengendalian intern, kompetensi aparatur dan ketaatan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi maluku utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil peneltian menunjukkan variabel Penerapan SIMDA berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. System informasi manajemen daerah (SIMDA), system pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, komptemsi aparatur tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal yang disebabkan yakni kondisi kompetensi aparatur yang masih rendah karena tidak berlatarbelakang akuntansi, pemahaman SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pengguna laporan keuangan akan menggunakan SAP untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Kewajaran laporan keuangan disusun berdasarkan bukti transaksi. Laporan keuangan yang berkualitas harus berdasarkan SAP sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan Harmadhani Adi Nugraha dan Yuli Widi astute (2013), dengan judul analisis penerapan System Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) Keuangan dalam pengolahan data keuangan pada organisasi pemerintah daerah (studi kasus pada dinas kesehatan kabupaten nganjuk). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana SIMDA keuangan sebagai system informasi akuntansi daerah dapat mempermudah tugas pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah, pengendalian inter system yang diharapkan guna mencapai tujuan pelaporan, dan cakupan analisa kualitas informasi yang dihasilkan oleh system tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil yang di peroleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa : aplikasi SIMDA keuangan telah menghasilkan informasi laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya dengan kualitas relevansi, akurasi, dan ketepatan waktu yang lebih baik daripada pengolahan dengan sistem sebelumnya atau sistem manual.

Penelitian yang dilakukan Yogi Hartanto, Tjahjamulin Domai, dan Fadillah Amin (2017), dengan judul Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) Keuangan Terhadap Efektivitas Pelaporan Keuangan (Studi pada Badan Keuangan dan Aset daerah di Kabupaten Blitar). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan system informasi manajemen daerah (SIMDA) pada badan pengelolaan keuangan dan asset daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa: kualitas penerapan SIMDA Keuangan terhadap pelaporan keuangan di BPKD Kabupaten Blitar berjalan secara efektif.

Penelitian yang dilakukan P.Ayu Ratna Dewi dan Ni Putu Sri Harta Mimba (2014), dengan judul Pengaruh Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan

Keuangan Daerah (SIPKD) Pada kualitas laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas System Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) serta pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kota Denpasar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis kuantitatif serta analisis regresi linear sederhana digunakan sebagai teknik analisis data. Hasil yang diperoleh dalam dari penelitian ini menunjukkan tingkat efektivitas SIPKD di pemerintah kota Denpasar termasuk dalam kriteria efektif dan efektivitas penerapan SIPKD berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kota Denpasar.

Tabel 2.1
Hasil Peneliti Terdahulu

| Nama Peneliti (tahun) | Judul | Metode Penelitian | Hasil |
|--------------------------|--|--|--|
| Nur Ulfiati (2017) | Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA), Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah | analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS versi 21. | Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa : 1. Implementasi SIMDA berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Tegal, 2. Kualitas sumber daya |

| | | | |
|---|--|------------------------|--|
| | Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. | | manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tegal. |
| Aulia Lorie Pangestika dan Yeni Priatma Sari (2016) | Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tegal. | Deskriptif Kualitatif. | Hasil yang di peroleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa : laporan keunagan yang dihasilkan SIMDA dapat dipahami oleh masyarakat, para wakil rakyat, investor dan pemerintah , dan laporan keuangan yang dihasilkan SIMDA releva, Andal dan dapat diperbandingkan, pada tahun 2008 sebelum |

| | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--|
| | | | <p>diterapkannya SIMDAperaturan Bupati untuk tahun anggaran 2008 dapat diterbitkan pada 23 januari tahun 2008 setelah adanya SIMDA pada tahun 2014 peraturan bupati untuk anggaran 2015 dapat diterbitkan pada 31 Desember 2014. Dan system informasi yang dihasilkan system informasi manajemen daerah berdasarkan hasil dengan pendekatan fenomologi adalah efektif.</p> |
| Natalia Deisi Lumintang (2015). | Analisis Penerapan Sistem Informasi | Deskriptif Kualitatif | Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukan bahwa |

| | | | |
|------------------------------------|--|--------------------|---|
| | <p>Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Miliki Daerah Kota Manado.</p> | | <p>secara umum pegawai BPK-BMD Manado sudah memahami makna SIMDA Keuangan serta gambaran pelaksanaannya yang berkaitan dengan input dan output datanya, faktor-faktor yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan penerapan SIMDA Keuangan yaitu komunikasi, Sumber daya manusia, sikap/disposisi dan struktur birokrasi.</p> |
| <p>Haryati Saleh Ramesa (2015)</p> | <p>Analisis Faktor-faktor pendukung dan kualitas informasi</p> | <p>Kualitatif.</p> | <p>Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa :</p> <p>1. Faktor-fator</p> |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>penerapan system informasi manajemen daerah (SIMDA) keuangan pada pemerintah kota kendari.</p> | | <p>pendukung yang dimiliki oleh BPKAD Kota Kendari untuk menerapkan SIMDA Keuangan, Sumber Daya Manusia yang telah memadai sebagai implementor SIMDA Keuangan, Sikap/Disposisi yang mau menerima dan mengimplementasikan kebijakan penerapan Simda Keuangan, serta struktur birokrasi yang baik terkait dengan pengawasan atas jalannya aplikasi SIMDA Keuangan, 2. Dari beberapa karakteristik informasi yang baik diantaranya ketepatan waktu,</p> |
|--|---|--|--|

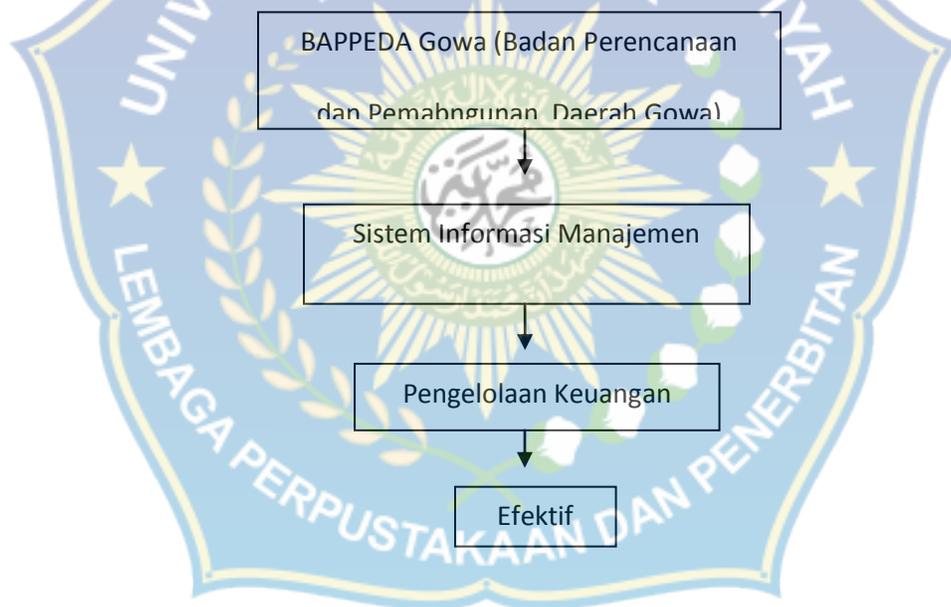
| | | | |
|----------------------------------|--|------------------------------|--|
| | | | <p>akurat dan relevan.</p> <p>Dapat disimpulkan bahwa kualitas informasi yang dihasilkan oleh BPKAD Kota Kendari sudah baik, karena terpenuhinya ketiga karakteristik kualitas informasi tersebut.</p> |
| <p>Halens Ryanlie Ole (2014)</p> | <p>Analisis Implementasi System Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Studi Kasus Pada Dinas PPKAD Kabupaten Minahasa Tenggara).</p> | <p>Deskriptif kualitatif</p> | <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : proses penggunaan SIMDA telah sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.</p> |

| | | | |
|---------------------------------|--|--------------------|---|
| <p>Mitami Dian M (2013)</p> | <p>Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen daerah (SIMDA) Keuangan pada Pemerintah daerah Kabupaten Pangkep.</p> | <p>Kualitatif.</p> | <p>Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan SIMDA Keuangan pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemerintah Kabupaten Pangkep, serta mengetahui faktor-faktor dan nilai-nilai pendukung yang dimiliki oleh DPKAD Pangkep sehingga mampu menerapkan SIMDA Keuangan, serta kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapannya.</p> |
|---------------------------------|--|--------------------|---|

C. Kerangka Konsep

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan SIMDA Keuangan pada pemerintah daerah khususnya pada pemerintah Kabupaten Gowa dengan model kualitatif. Oleh karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka dilakukan observasi langsung untuk mendapatkan kondisi alamiah dilapangan . data wawancara dan dokumentasi hasil penelitian dilakukan analisis. Analisis terdiri dari organisasi dan pemahaman untuk menemukan tema dan interpretasi dengan dikaitkan pada teori/konsep maupun hasil-hasil penelitian terdahulu.

Gambar 2.1



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif ini digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) untuk Pengelolaan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Gowa berjalan dengan efektif.

B. Fokus Penelitian.

Untuk mempermudah penulis dalam penelitian, maka penelitian ini difokuskan pada pegawai yang bekerja pada bagian bidang perencanaan dan keuangan daerah yang ada di BAPPEDA Gowa. Pengumpulan data dalam bentuk wawancara, observasi dan dokumentasi. Sistem Informasi Manajemen daerah (SIMDA) merupakan system yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan pelaporan keuangan daerah yaitu untuk mengetahui apakah dengan diterapkannya SIMDA penyajian informasi pengelolaan keuangan sudah dijalankan secara efektif.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian.

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, lokasi penelitian yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Gowa yang berkedudukan di Jl. Tumanurung No. 04 Sungguminasa.

b. Waktu Penelitian.

Waktu penelitian dilaksanakan selama 2 bulan dari bulan mei sampai juli pada tahun 2019

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara lgsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara terhadap responden.
2. Data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen BAPPEDA Kabupaten Gowa.

E. Teknik Pengumpulan Data.

1. Wawancara, merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab.
2. Observasi (pengamatan langsung), yaitu dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dilokasi untuk memperoleh data yang diperlukan. teknik observasi digunakan untuk menggali data yang berupa peristiwa, tempat, lokasi, dan benda, serta rekaman gambar.
3. Dokumentasi, Dalam penelitian ini dokumentasi tertuju pada bagian keuangan sebagai tempat penelitian. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah laporan dan catatan penting yang dimiliki

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Kabupaten Gowa.

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi instrument utama penelitian yaitu kamera dan pedoman wawancara. Kamera dipakai untuk merekam dan mendokumentasikan hasil wawancara. Dan pedoman wawancara bertujuan untuk mempermudah pewawancara dalam menggali pertanyaan.

G. Metode Analisis

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data sintetis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Menurut Faridah (2015), Pada penelitian ini tahap-tahap analisis data dilakukan sebagai berikut :

1. Mengorganisir Data

Peneliti mendapatkan data langsung dari subjek melalui wawancara tidak terstruktur, artinya data diperoleh dengan wawancara langsung tanpa memberikan draft pertanyaan pada objek wawancara. Setelah melakukan wawancara, analisis data dimulai dengan membuat transkrip hasil wawancara, dengan cara memutar kembali rekaman hasil wawancara, mendengarkan dengan seksama, kemudian menuliskan kata-kata yang

didengar sesuai dengan apa yang ada direkaman tersebut. Hal ini dilakukan agar peneliti mengerti benar data atau hasil yang telah didapatkan.

2. Penyederhanaan Data

Setelah data diorganisir, kemudian data yang didapatkan disederhanakan dalam bentuk pengurangan data yaitu membuang atau mengurangi data yang tidak penting sehingga data yang terpilih dapat di proses ke langkah selanjutnya.

3. Proses Analisis Data

Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban wawancara. Apabila jawaban tersebut belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu sampai diperoleh data yang dianggap kredibel.

4. Hasil Interpretasi

Hasil interpretasi diperoleh dari hasil pemahaman coding data pada penelitian ini kemudian dikaitkan dengan teori yang ada sehingga interpretasi tidak bersifat bias tetapi dapat dijelaskan oleh teori tersebut. Dalam melakukan interpretasi, penelitian ini juga tidak terlepas dari kejadian yang ada pada setting penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil BAPPEDA Kabupaten Gowa

BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) merupakan lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan ini mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan :

1. Bahwa dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah.
2. Bahwa dalam rangka usaha menjamin laju perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan didaerah, diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu.

Bertitik tolak pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dikeluarkanlah Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980. Tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980,

tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II.

Pembangunan Kabupaten Gowa lima sampai dua puluh tahun kedepan diarahkan kepada perwujudan Kkabupaten Gowa sebagai daerah yang handal dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*). Untuk mencapai harapan dimaksud, proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

2. Visi dan Misi Organisasi

a. Visi :

Bappeda menjadi rujukan perencanaan pembangunan daerah

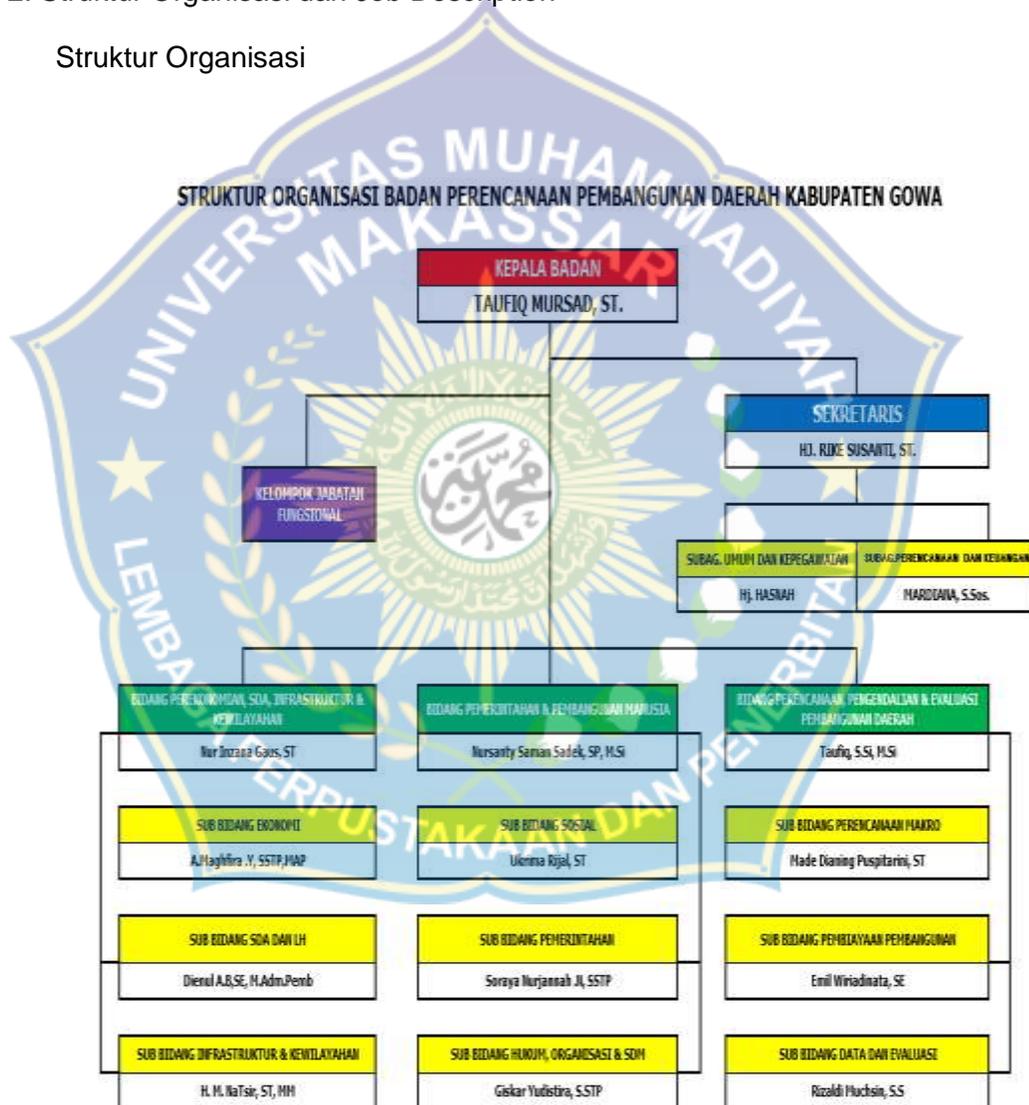
b. Misi :

- a) Meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
- b) Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan ekonomi yang berbasis pada potensi unggulan daerah
- c) Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan

- d) Meningkatnya kualitas perencanaan bidang Sumber Daya Alam (SDA), Infrastruktur dan Kewilayahan
- e) Meningkatnya kapasitas aparatur perencana dan pelayanan administrasi perkantoran.

2. Struktur Organisasi dan Job Description

Struktur Organisasi



Gambar 1.1

Job Description

a) Kepala Bappeda

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan, Mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
2. Menyusun rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
3. Menyusun Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Bappeda.
4. Mengkoordinasikan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja dengan Instansi / Unit Kerja terkait.
5. Mengarahkan dan menetapkan kebijakan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda.

b) Sekretaris

1. Melaksanakan urusan umum dan ketatalaksanaan bidang kepegawaian, keuangan serta perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Menyusun Rencana Kerja Sekretariat.
3. Mengkoordinasikan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Satuan Kerja dengan Kepala Badan serta para Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

c) Subag Perencanaan dan Keuangan

1. Mempelajari dan memahami Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas

2. Menyusun Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Satuan Kerja
3. Membina dan mengkoordinir tugas-tugas kerja di lingkup sub bagiannya
4. Membantu sekretaris dalam rangka Menghimpun dan merumuskan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

d) Subag. Umum Kepegawaian

1. Menyiapkan dan merumuskan rancangan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Satuan Kerja
2. Mengkoordinasikan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Anggaran Sub Bagian dengan Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Perencana dan Kepala Sub Bagian Keuangan Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Badan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya
3. Membantu Kepala Badan dalam Pembinaan dan pengembangan pegawai di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

e) Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan

1. Penyelenggaraan dan Pengkoordinasian Perencanaan Pembangunan di bidang Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan
2. Membantu Kepala Badan dalam pembinaan dan pengembangan pegawai di lingkup Bidang Prasarana Wilayah dan SDA
3. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dan informasi, menginventarisasi permasalahan permasalahan serta merumuskan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan SDA

4. Menyelenggarakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Bidang dalam rangka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

f) Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

1. Mempelajari dan memahami Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas
2. Mengkaji Program Kerja Sub Bidang Prasarana Wilayah berdasarkan Program Kerja Bidang dan Rencana Kerja Badan
3. Mengkoordinasikan dan mengontrol pelaksanaan Program Kerja dalam lingkup Sub Bidang Prasarana Wilayah
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan Program Kerja dengan Sub Bidang yang lain atau Instansi / Unit Kerja terkait
5. Membantu kepala Bidang dalam menyusun laporan Sub Bidang secara berkala
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

g) Sub Bidang SDA dan LH

1. Mempelajari dan memahami Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas
2. Mengkaji program Kerja Sub Bidang SDA, dan LH berdasarkan Program Kerja Bidang dan Rencana Kerja Badan
3. Mengkoordinasikan dan mengontrol pelaksanaan Program Kerja dalam lingkup Sub Bidang

4. Membantu Kepala Badan dalam pembinaan dan pengembangan pegawai di lingkup Sub Bidang SDA dan LH
5. Menganalisis kebijakan perencanaan pembangunan bidang SDA dan LH sertamenyiapkan perumusan kebijakan dan penerapannya didaerah

h) Sub Bidang Ekonomi

1. Merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang ekonomi
2. Mempelajari dan memahami Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas
3. Mengkaji program Kerja Bidang berdasarkan Rencana Kerja Bidang Ekonomi
4. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan Program Kerja dengan Sekretariat, Bidang yang lain dan Instansi / Unit Kerja terkait
5. Membantu Kepala Badan dalam pembinaan dan pengembangan pegawai di lingkup Bidang

i) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

1. Mempelajari dan memahami Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas
2. Mengkaji Program Kerja Bidang berdasarkan Rencana Kerja Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
3. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program Kerja dengan Sekretariat, Bidang yang lain dan Instansi / Unit Kerja terkait

4. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan serta program kerja Bidang dan Sub Bidang sesuai dengan tugas masing-masing

j) Sub Bidang Sosial

1. Membantu Kepala Badan dalam pembinaan dan pengembangan pegawai di lingkup Bidang
2. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada Sub Bidang sesuai dengan tugas
3. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi instansi vertikal dan perangkat daerah lainnya dengan Badan
4. Mengkoordinir penyiapan bahan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pengkajian serta pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan

k) Sub Bidang Pemerintahan

1. Mengkoordinir penyiapan, menyusun konsep /naskah dinas, menandatangani dan atau memaraf Naskah Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
2. Membuat pengawasan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang
3. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang
4. Menyelenggarakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Bidang dalam rangka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

I) Sub Bidang Hukum, Organisasi dan SDM

1. Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Hukum, Organisasi dan SDM
2. Mengkaji program Kerja Sub Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Mental Spritual, berdasarkan Program Kerja Bidang dan Rencana Kerja Anggaran
3. Mengkoordinasikan dan mengontrol pelaksanaan Program Kerja dalam Lingkup Sub Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Mental Spritual
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan Program Kerja dengan Sub Bidang yang lain atau Instansi / Unit Kerja terkait

m) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

1. Menghimpun serta mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas Sub Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Mental Spritual
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi instansi vertikal dengan perangkat daerah khususnya yang berkaitan dengan Perencanaan Pembangunan sektor Pemerintahan, Pendidikan dan ,Mental Spritual
3. Melakukan pengawasan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bidang

4. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sub Bidang secara berkala

n) Sub Bidang Perencanaan Makro

1. Merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Penelitian, Pengembangan, Monitoring dan Evaluasi
2. Menyusun program kerja bidang berdasarkan rencana kerja badan
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan rencana kerja dalam lingkup bidang

o) Sub Bidang Perencanaan Makro

1. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi instansi vertikal dan perangkat daerah lainnya
2. Menghimpun, mengklasifikasi dan menyusun data statistik sebagai bahan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Membantu kepala Badan dalam menyusun laporan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Bidang.

p) Sub Bidang Data dan Evaluasi

1. Mempelajari dan memahami Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas
2. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan tugas Sub Bidang
3. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala.

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia memegang peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan penegelolaan keuangan dan aset. Data pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa berjumlah 38 orang dengan kualifikasi sebagai berikut :

Tabel 4.1
Berdasarkan Pangkat/Golongan.

| No. | Golongan | Laki-laki | Perempuan | Total Orang | % |
|-------|--------------|-----------|-----------|-------------|-------|
| 1 | Golongan I | 1 | - | 1 | 0,026 |
| 2 | Golongan II | 1 | 3 | 4 | 0,106 |
| 3 | Golongan III | 12 | 16 | 28 | 0,736 |
| 4 | Golongan IV | 3 | 2 | 5 | 0,132 |
| TOTAL | | 17 | 21 | 38 | 1 |

Sumber :BAPPEDA Kab. Gowa

Tabel diatas merupakan data pegawai/staf BAPPEDA Kabupaten Gowa yang bekerja di bidang masing-masing berdasarkan golongan yang dimana semua pegawai laki-laki berjumlah 17 orang dan semua pegawai perempuan berjumlah 21 orang, jadi total jumlah semua pegawai BAPPEDA Gowa berjumlah 38 orang. Dimana golongan 1 berjumlah 1 orang yang terdiri dari Kepala Badan BAPPEDA Gowa, golongan 2 terdiri dari Kepala Sub Bidang masing-masing yang berjumlah 4 orang, golongan 3 yaitu terdiri dari pegawai tetap BAPPEDA Gowa yang berjumlah

28 orang dan golongan 4 terdiri dari pegawai honorer/ operator computer BAPPEDA Gowa yang terdiri dari 5 orang.

Tabel 4.2
Berdasarkan Pendidikan

| No. | Pendidikan | Laki-laki | Perempuan | Total Orang | % |
|-------|--------------------|-----------|-----------|-------------|-------|
| 1 | SLTA | 3 | 3 | 6 | 0,157 |
| 2 | Sarjana Muda/D III | - | - | - | - |
| 3 | Sarjana (S1) | 8 | 15 | 23 | 0,606 |
| 4 | Master (S2) | 5 | 4 | 9 | 0,237 |
| 5 | Doktor (S3) | - | - | - | - |
| TOTAL | | 16 | 22 | 38 | 1 |

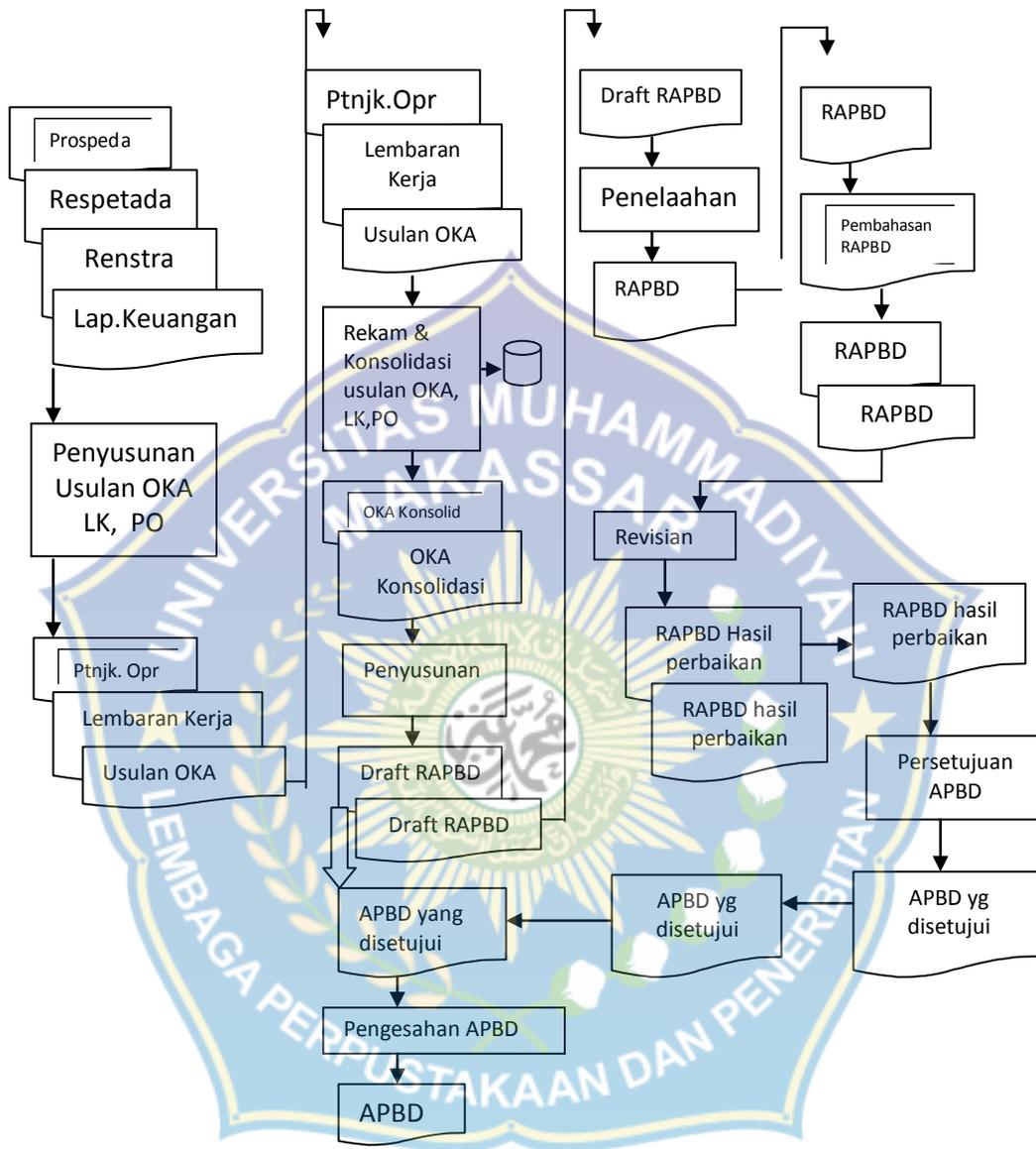
Sumber: BAPPEDA Kab. Gowa

Tabel diatas merupakan data pegawai/staf BAPPEDA Kabupaten Gowa yang bekerja di bidang masing-masing berdasarkan pendidikan. Dimana pegawai yang berpendidikan SLTA sederajat berjumlah 6 orang, pegawai yang sarjana muda/DIII tidak ada, pegawai yang lulusan Sarjana (S1) berjumlah 23 orang dimana perempuan berjumlah 15 orang dan laki-laki berjumlah 8 orang, pegawai yang lulusan Master (S2) berjumlah 9 orang dimana perempuan berjumlah 4 orang dan laki-laki berjumlah 5 orang, dan Bappeda Gowa tidak memiliki pegawai yang lulusan Doktor (S3).

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa dalam pelaporan keuangan saat ini telah berpedoman pada Pemendagri No 64 tahun 2013 dengan melaksanakan tata usaha keuangan daerah dengan pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri dari Laporan Arus kas, Laporan Realisasi/Perhitungan APBD, Neraca dan Perhitungan Anggaran.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa melakukan penyusunan Neraca awal yang akan digunakan sebagai titik tolak pelaksanaan Sistem Keuangan daerah. Berdasarkan hasil inventarisasi baik Aset atau Harta daerah, Hutang, Piutang, investasi bahkan kas dan persediaan ini Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene menyusun Neraca Awal. Setelah Neraca Awal tersusun Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah dengan menggunakan komputerisasi. Sehingga setiap transaksi yang sudah terjadi dicatat sesuai dengan metode pencatatan yang digunakan dalam sistem akuntansi keuangan daerah. Semua tahap siklus telah dijalankan dengan baik. Begitu juga dengan kelengkapan item laporan keuangannya telah sesuai dengan ketentuan Laporan keuangan SKPD yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas laporan keuangan.



Gambar 2.2 Flowchart Prosedur pengelolaan Keuangan Daerah

Siklus keuangan daerah dimulai dengan penyusunan anggaran. Penyusunan Anggaran dimulai dengan menganalisis Laporan Pertanggungjawaban tahun lalu yang menghasilkan Rencana Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah(RAPBD). RAPBD akan dibahas dengan DPRD dan menjadi Perda APBD. Untuk merealisasi pelaksanaan APBD, maka dibuat Otorisasi Kredit Anggaran (OKA), Lembaran Kerja (LK) dan Petunjuk Operasional (PO) Penyusunan OKA ini dilakukan oleh Unit Anggaran dengan Saruan kerja berdasarkan usulan OKA, LK dan PO oleh Satuan Kerja. OKA, LK, dan PO disahkan oleh Kepala Unit Anggaran.

Satuan Kerja melakukan pemungutan pendapatan dan melakukan penyetoran dana ke kas daerah dengan STS dan melakukan realisasi pengeluaran dengan SPM STS dan SPM tersebut akan menjadi dokumen sumber pembukuan pendapatan dan belanja. Unit Pembukuan akan menerima dokumen sumber pendapatan dan pengeluaran (APBD, OKA, STS, SPM) dan membukukannya secara periodik. Pada akhir tahun, Unit Pembukuan membuat Laporan Pertanggungjawaban berupa Laporan Perhitungan APBD, Neraca dan Laporan Arus Kas yang selanjutnya diserahkan ke Unit Perhitungan Anggaran untuk dianalisis.

Unit Perhitungan Anggaran menganalisis Laporan Pertanggungjawaban dan melengkapi Laporan Pertanggungjawaban tersebut dengan Nota Perhitungan Anggaran. selanjutnya Laporan Pertanggungjawaban (Laporan Perhitungan Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Nota Perhitungan Anggaran) disampaikan ke pada Kepala Daerah. Kepala Daerah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban ke DPRD sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Laporan Pertanggungjawaban.

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, kajian teori dan metodologi penelitian yang telah diuraikan terdahulu, maka pada sub bab ini akan disajikan hasil penelitian melalui wawancara langsung dengan informan yang telah dipilih, informan tersebut adalah pegawai/staf yang terkait langsung dengan proses akuntansi di BAPPEDA Kabupaten Gowa. Hal ini untuk menjamin validitas informasi yang disampaikan.

Selanjutnya dilakukan impretasi dengan teori/konsep yang mendukung hasil penelitian. Adapun hasil penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan BAPPEDA Kabupaten Gowa.

Penyajian Laporan Keuangan yang digunakan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gowa berdasarkan hasil wawancara yaitu terdiri atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pelaporan keuangan BAPPEDA Kabupaten Gowa yang diperoleh peneliti yaitu menyajikan perbandingan antara suatu periode akuntansi dan periode akuntansi sebelumnya. Agar perbandingan dapat bermanfaat maka informasi keuangan periode akuntansi dilaporkan secara konsisten dengan informasi keuangan periode akuntansi sebelumnya. Maka dari itu dilakukan pertanyaan sebagai berikut : Apa tujuan utama dari pengelolaan keuangan ditempat ini? Ibu Mardiana S.Sos bagian perencanaan dan keuangan menyatakan bahwa :

“Pengelolaan keuangan ditempat ini memiliki tujuan utama yakni agar seluruh proses penyusunan keuangan daerah berjalan semaksimal mungkin

dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi”

Wawancara diatas menunjukkan bahwa tujuan dari pengelolaan keuangan sejalan dengan definisi pengelolaan keuangan menurut PP RI No. 58 2005 dimana pengelolaan keuangan adalah pengelolaan keungan yang bertumpu/berfokus pada kepentingan public (public oriented), hal ini tercermin dari besarnya jumlah alokasi anggaran untuk kepentingan public serta jumlah partisipasi masyarakat yang ikut dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan keuangan daerah. Maka dari, pengelolaan daerah diharuskan untuk transparan dan mempunyai akuntabilitas yang tinggi sehingga tercipta pengelolaan daerah yang efektif dan efisien. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah disusun sesuai kebutuhan penyelenggaran pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Kesimpulan penulis tentang jawaban dengan definisi menurut PP RI No. 58 2005 sudah sesuai karena pengelolaan keuangan dikelola secara tertib dan taat pada perarturan perundang-undangan serta efektif dan efisien untuk masyarakat.

a. Laporan Realisasi Anggaran

Tabel 4.3

**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Thn
Anggaran 2018**

| No. urut | URAIAN | Anggaran 2018 | Realisasi 2018 | % | Realisasi 2017 |
|----------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------|--------------------|
| 1 | BELANJA | 6.459.606.436,90 | 6.082.454.139,00 | 94,16 | 5.426.425.939,00 |
| 2 | BELANJA OPERASI | 6.373.008.976,90 | 5.995.857.139,00 | 94,08 | 5.284.790.479,00 |
| 3 | Belanja Pegawai | 2.706.859.755,90 | 2.609.034.752,00 | 96,39 | 2.421.493.634,00 |
| 4 | Belanja Barang | 3.666.149.221,00 | 3.386.822.387,00 | 92,38 | 2.863.296.845,00 |
| 5 | BELANJA MODAL | 86.597.460,00 | 86.597.000,00 | 100,00 | 141.635.460,00 |
| 6 | Belanja modal Peralatan dan Mesin | 86.597.469,00 | 86.597.000,00 | 100,00 | 101.662.710,00 |
| 7 | Belanja modal Aset Tak berwujud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.972.750,00 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (6.459.606.436,90) | (6.082.454.139,00) | 94,16 | (5.426.425.939,00) |
| | SISA LEBIH | (6.459.606.436,90) | (6.082.454.139,00) | 94.16 | (5.426.425.939,00) |
| | PEMBIAYAAN | | | | |
| | ANGGARAN (SILPA) | | | | |

Sumber : BAPPEDA Gowa

Tabel diatas menunjukkan Laporan Realisasi Anggaran pada BAPPEDA Kabupaten Gowa Laporan realisasi anggaran pemerintah daerah merupakan

laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan kepentingan antara realisasi dan anggarannya dalam suatu periode pelaporan.

b. Neraca

Tabel 4.4

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NERACA
PER 31 DESEMBER 2018**

| NAMA PERKIRAAN | 2018 | 2017 |
|------------------------------|--------------|------|
| ASET LANCAR | 0,00 | 0,00 |
| Kas di Bendahara Penerimaan | | |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 3.862.000,00 | 0,00 |
| Kas di BLUD | 0,00 | 0,00 |
| Kas di Bendahara FTKP | 0,00 | 0,00 |
| Kas di Bendahara BOS | 0,00 | 0,00 |
| Kas di Bendahara JKN | 0,00 | 0,00 |
| Kas di Bendahara FKTP | 0,00 | 0,00 |
| Setara Kas | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---------------------|-------------------|
| Investasi jangka Pendek | 0,00 | 0,00 |
| Piutang Pendapatan Piutang Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| Penyisihan Piutang | 0,00 | 0,00 |
| Beban Dibayar Dimuka | 524.445,00 | 605.665,83 |
| Persediaan | 430.000,00 | 0,00 |
| JUMLAH ASET LANCAR | 4.816.445,00 | 605.665,83 |
| INVESTASI JANGKA PANJANG | | |
| Investasi jangka Panjang Non Permanen | | |
| Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| Investasi dalam obligasi | 0,00 | 0,00 |
| Investasi dalam proyek pembangunan | 0,00 | 0,00 |
| Dana bergulir | 0,00 | 0,00 |
| Deposito jangka panjang | 0,00 | 0,00 |
| Investasi Non permanen lainnya | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah investasi jangka panjang non permanen | 0,00 | 0,00 |
| Investasi jangka panjang permanen | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Penyertaan Modal Pemerintah daerah | 0,00 | 0,00 |
| Investasi permanen lainnya | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah investasi jangka panjang permanen | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen | 0,00 | 0,00 |
| ASET TETAP | | |
| Tanah | 0,00 | 0,00 |
| Peralatan dan Mesin | 1.260.095.060,00 | 1.116.383.560,00 |
| Gedung dan Bangunan | 1.851.183.651,00 | 1.851.183.651,00 |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 |
| Aset Tetap Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| Konstruksi dalam pengerjaan | 0,00 | 0,00 |
| Akumulasi penyusutan | (2.067.658.753,08) | (1.925.950.150,18) |
| JUMLAH ASET TETAP | 1.049.119.957,92 | 1.047.117.060,82 |
| DANA CADANGAN | | |
| Dana cadangan | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 |
| Aset Lainnya | | |
| Tagihan Jangka Panjang | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Kemitraan dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 |
| Aset Tidak Berwujud | 316.672.750,00 | 316.672.750,00 |
| Aset Lain-lain | 1.476.009.250,00 | 1.476.009.250,00 |
| Akumulasi Amortisasi | (143.755.687,50) | (104.171.593,75) |
| Akumulasi Penyusutan Aset Linnya | (1.465.603.131,25) | (1.465.603.131,25) |
| Jumlah Aset lainnya | 183.323.181,25 | 222.907.275,00 |
| JUMLAH ASET | 1.237.259.584,17 | 1.270.630.001,65 |
| KEWAJIBAN | | |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | |
| Utang Kepada Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 |
| Utang Bunga | 0,00 | 0,00 |
| Bagian lancar utang jangka panjang | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan diterima dimuka | 0,00 | 0,00 |
| Utang beban | 530.000,00 | 5.348.385,00 |
| Utang jangka pendek lainnya | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | 530.000,00 | 5.348.385,00 |
| Kewajiban Jangka Panjang | | |
| Utang Dalam Negeri | 0,00 | 0,00 |
| Utang Jangka Panjang lainnya | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah Kewajiban Jangka Panjang | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH KEWAJIBAN | 530.000,00 | 5.348.385,00 |

| | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| EKUITAS | | |
| Ekuitas | 1.236.729.584,17 | 1.265.281.616,65 |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA | 1.237.256.584,17 | 1.270.630.001,65 |

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Gowa

Tabel diatas menunjukkan Laporan Neraca pada BAPPEDA Kabupaten Gowa dimana neraca diatas disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing.

c. Laporan Operasional

**BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DES 2017 DAN 2018**

| NAMA PERKIRAAN | CTT | TAHUN 2018 | TAHUN 2017 |
|--------------------------------------|-----|----------------------|----------------------|
| KEGIATAN OPERASIONAL | | | |
| PENDAPATAN OPERASIONAL | | | |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak | | 31.645.300.00 | 30.526.342.00 |
| Jumlah Pendapatan Operasional | | 31.645.300.00 | 30.526.342.00 |
| BEBAN OPERASIONAL | | | |
| Beban Pegawai | | 35.400.835.627.00 | 34.789.604.121.00 |
| Beban Persediaan | | 409.421.381.00 | 373.325.836.00 |
| Beban Barang dan Jasa | | 1.588.118.819.00 | 1.440.049.352.00 |
| Beban pemeliharaan | | 979.554.807.00 | 940.811.743.00 |
| Bebabn Perjalanan Dinas | | 5.564.682.174.00 | 6.810.709.124.00 |

| | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|
| Beban Penyusutan dan Amortisasi | | 925.506.086.00 | 1.159.575.235.00 |
| Jumlah Beban Operasional | | 44.868.119.894.00 | 45.514.075.411.00 |
| Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasi | | (44.836.474.594.00) | (45.483.549.069.00) |
| KEGIATAN NON OPERASIONAL | | | |
| SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL LAINNYA | | | |
| Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | | 33.517.232.00 | 43.792.336.00 |
| Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | | 122.010.00 | 0,00 |
| Surplus Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | | 33.395.222.00 | 43.792.336.00 |
| Surplus (Defisit) Dari kegiatan Non Operasional | | 33.395.222.00 | 43.792.336.00 |
| SURPLUS (DEFISIT)-LO | | (44.803.079.372.00) | (45.439.756.733.00) |

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Gowa

Tabel diatas menunjukkan Laporan Realisasi Anggaran pada BAPPEDA Kabupaten Gowa Laporan Operasional pemerintah yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya untuk kegiatan penyelenggaraan dalam satu periode pelaporan.

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Tabel 4.6

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018**

| NAMA PERKIRAAN | CTT | JUMLAH |
|----------------------------------|------------|------------------|
| EKUITAS AWAL | | 37.360.783.204 |
| SURPLUS/(DEFISIT)-LO | | (27.757.430.657) |
| PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN | | 5.642.480 |

| | | |
|---|--|----------------|
| Penyesuaian Nilai Aset | | 5.642.480 |
| Jumlah Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan | | |
| DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR | | - |
| Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi | | - |
| Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar | | |
| TRANSAKSI ANTAR ENTITAS | | 27.678.449.872 |
| KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS | | (73.338.305) |
| EKUITAS AKHIR | | 37.287.444.899 |

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Gowa

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang andal dan relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Khususnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan Negara, laporan keuangan pemerintah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Pemahaman SIMDA Keuangan

Ciri utama SIMDA Keuangan adalah sistem komputerisasi yang dirancang untuk membantu proses pengolahan data keuangan pada pemerintah daerah. Secara umum pegawai yang terkait dengan proses pengoperasian SIMDA Keuangan pada BAPPEDA Kabupaten Gowa telah mengerti/paham tentang makna dan tujuan dari penerapan SIMDA Keuangan. Hal ini terbukti dari wawancara dengan staf di BAPPEDA Kabupaten Gowa dimana penulis melakukan pertanyaan

Apa yang anda ketahui tentang SIMDA ? terhadap Ibu Mardiana S.Sos bagian perencanaan dan keuangan yang bertugas dalam pengoperasian SIMDA Keuangan yang mengatakan

“yang jelas SIMDA itu sebuah aplikasi computer untuk mengolah transaksi keuangan daerah”. Melanjutkan “SIMDA itu adalah sebuah sistem yang bekerja secara terintegrasi untuk mengolah data keuangan pemerintah daerah”.

Pendapat staf tersebut sesuai dengan pengertian SIMDA Keuangan umum menurut BPKP (2008:21) yaitu sebuah sistem komputerisasi yang dirancang untuk membantu proses pengolahan laporan keuangan pemerintah daerah. Jadi kesimpulan penulis dari jawaban dan menurut BPKP tahun 2008 mengenai SIMDA sudah sesuai karena SIMDA itu merupakan program aplikasi untuk mengolah data dan mempermudah pekerjaan.

Sebuah implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan, konsistensi atau keseragaman dari ukuran-ukuran dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Berikut ini hasil wawancara mengenai Apa tujuan penerapan SIMDA ?. Ibu Mardiana S.Sos bagian perencanaan dan keuangan mengungkapkan bahwa:

“Tujuan diterapkannya SIMDA Keuangan ini untuk membantu pengolahan data keuangan, mempercepat proses penyusunan laporan keuangan, dan manfaatnya telah dirasakan. Proses penyajian laporan keuangan menjadi

lebih mudah dengan adanya sistem ini. SIMDA Keuangan ini juga mempermudah proses penyajian RKA, DPA dan SPD, data tinggal diinput dan otomatis akan terolah sendiri”

Wawancara diatas menunjukkan bahwa Staf BAPPEDA Gowa telah mengetahui secara umum tujuan dari penerapan SIMDA Keuangan menurut BPKP (2008:25) program aplikasi SIMDA Keuangan adalah suatu program aplikasi yang ditujukan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi. Kesimpulan penulis dari jawaban dan menurut BPKP tahun 2008 mengenai tujuan program aplikasi SIMDA sudah sesuai karena untuk membantu pengelolaan pekerjaan keuangan pegawai secara terintegrasi. Setiap pegawai yang memiliki kewajiban dalam pembuatan laporan keuangan merasakan manfaat yang sama dari tujuan penerapan SIMDA Keuangan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Gowa.

Selain pemahaman pegawai mengenai tujuan dari penerapannya, untuk menambah gambaran pemahaman pegawai mengenai SIMDA Keuangan, pegawai juga perlu memahami setiap input yang akan diolah atau diproses pengolahannya. Adapun output yang dimaksud dari proses pengolahan data pada SIMDA keuangan merupakan elemen-elemen laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diatur dalam permendagri 13 tahun 2006.

Berikut wawancara dengan Ibu Mardiana S.Sos bagian perencanaan dan keuangan pada BAPPEDA Gowa dengan pertanyaan Bagaimana proses pelaksanaan kerja SIMDA keuangan, bisa dijelaskan dari tahap proses penginputan?

“yah sebenarnya begini dek, disini ada 3 macam laporan yang kita buat, ada RKA, DPA, dan SPD. Nah peran SIMDA disini yah untuk membantu kita dalam pembuatan laporan itu tadi. Kita tidak perlu lagi dong mencatat-catat, kita hanya tinggal perlu input datanya masing-masing ke komputer, nah SIMDA itu yang akan bekerja secara otomatis. Tinggal print, jadi kan lebih gampang”.

Kesimpulan penulis mengenai wawancara tersebut memperjelas bahwa pegawai telah memahami makna SIMDA Keuangan secara umum yang diperlukan dalam pelaksana sebuah kebijakan. Pemahaman tersebut terlihat dari pengetahuan pegawai tentang pengertian, manfaat dan tujuan serta output yang dihasilkan dari pengolahan data dengan menggunakan sistem tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dengan Harmadhani Asdi Nugraha dan Yuli Widi Astuti (2013) yang menunjukkan bahwa pegawai telah memahami dan mengetahui aplikasi SIMDA Keuangan yang merupakan aplikasi sistem informasi manajemen yang secara terintegrasi mengelola keuangan pemerintah daerah dari proses input sampai output yang dihasilkan.

3. Faktor-faktor pendukung yang dimiliki oleh BAPPEDA Gowa dalam penerapan SIMDA Keuangan.

Penerapan SIMDA Keuangan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gowa khususnya oleh BAPPEDA Gowa tentunya tidak lepas dari prakondisi yang menjadi faktor pendukungnya. Dari hasil penelitian, berbagai faktor pendukung yang dimiliki untuk menerapkan SIMDA Keuangan pada BAPPEDA Gowa adalah sebagai berikut:

a. Komunikasi

Penerapan akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan penerapan dipahami oleh individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan, dalam hal ini kebijakan penerapan SIMDA Keuangan. Kejelasan ukuran dan tujuan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana.

Hasil wawancara dengan Ibu Mardiana S.Sos bagian perencanaan dan keuangan dengan pertanyaan Bagaimana komunikasi antara pimpinan dan staf mengenai penerapan SIMDA keuangan di kantor ini? Berikut kutipannya.

“karena komunikasi SIMDA sudah diterapkan disini otomatis sudah komunikasi terhadap staf dan pimpinan dengan baik”

Kesimpulan penulis pada wawancara diatas menunjukkan bahwa komunikasi telah aktif dilaksanakan. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari keaktifan para pegawai untuk menggali sumber informasi yang memadai baik melalui diskusi ataupun tukar pikiran.

Hal ini sudah sejalan dengan penelitian yang dilakukan Haryati Saleh Ramesa (2015) yang menyatakan bahwa komunikasi dan sosialisasi dilakukan sebelum penerapan SIMDA dengan pegawai dan dilakukannya diskusi-diskusi antar SKPD dengan

b. Sumber Daya Manusia

Faktor penting lain yang merupakan penentu keberhasilan penerapan suatu kebijakan yaitu upaya pengembangan sumber daya manusia.

Wawancara dengan Ibu Mardiana S.Sos bagian perencanaan dan keuangan dengan pertanyaan Bagaimana peningkatan kualitas SDM khususnya dalam proses pengoperasian SIMDA keuangan dikantor ini? Hasil dari wawancara sebagai berikut:

“sebenarnya jika berbicara tentang kualitas tidak semua staff yang memakainya contohnya diruangan ini hanya bendahara yang memakai SIMDA diruangan bawah hanya perencanaan yang memakai jadi kita tidak bisa ukur, sebenarnya personilnya SIMDA ini hanya program pelaporan”.

Kesimpulan penulis atas jawaban tersebut mengalami sedikit perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Haryati Saleh Ramesa (2015) yang menyatakan bahwa adanya peningkatan SDM melalui pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan SDM terhadap SIMDA keuangan. Dimana pada staf BAPPEDA tidak memahami betul kualitas SDM bisa ditingkatkan dengan cara mengikuti penelitian khusus atau diklat SIMDA yang diadakan oleh BPKP.

c. Disposisi/Sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati, tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses penerapan akan mengalami banyak masalah (Edward III:1980)

Dalam hal ini disposisi/sikap ini, ditemukan adanya respon yang baik dari para implementor karena mereka sadar bahwa penerapan SIMDA Keuangan akan membawa dampak yang baik sehingga mereka setuju untuk menerapkan SIMDA Keuangan. Hal tersebut terungkap dari wawancara dengan Ibu Mardiana S.Sos bagian perencanaan dan keuangan dengan pertanyaan Bagaimana respon pegawai atas penerapan SIMDA Keuangan?.

“responnya bagus, kembali lagi dek kita tidak bisa ukur bagaimana karena bukan personil kita semua yang memakainya karena respon tetapi jika menurut saya, saya setuju dengan penerapan sistem ini, karena dapat mempercepat proses pelaporan keuangan”

Kesimpulan penulis terhadap wawancara tersebut mengindikasikan bahwa dalam penerapan SIMDA keuangan pada BAPPEDA Gowa bahwa tidak semua karyawan yang memakai program ini jadi tidak dibisa dilakukan pengukuran yang terpenting responnya cukup baik. Hal ini sejalan dengan penelitian Haryati Saleh Ramesa (2015) yang menyatakan bahwa setuju dengan penerapan SIMDA Keuangan karena dapat memepercepat proses pelaporan keuangan, setuju dengan peenerapan SIMDA Keuangan karena bisa menyiapkan segala fasilitas mulai dari erencanaan sampai dengan pelaporan, setuju dengan penerapan SIMDA Keuangan karena aplikasinya tiak rumit dan mudah pemeliharanya, setuju dengan penerapan SIMDA keuangan karena sangat membantu, dapat mengefektifkan wktu dan menegefisienkan biaya.

d. Strutur birokrasi/Pengawasan

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan eksekutif yang mempunyai hubungan yang baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang. Unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam penerapan kebijakan salah satunya adalah tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana. Pengawasan pada BAPPEDA Gowa selalu ditekankan dari atasan jadi pegawai senantiasa selalu mengecek. Hal ini tercantum pada wawancara terhadap Ibu Mardiana S.Sos bagian perencanaan dan keuangan dengan pertanyaan Bagaimana tingkat pengawasan dalam proses pelaksanaan penerapan SIMDA Keuangan dikantor ini ? hasil dari wawancara sebagai berikut:

“pengawasan pasti tetap ada pengawasan dari atasan karena setiap saat itu dicek bagaimana SPDnya bagaimana poses pencairannya jadi terkontrol”.

Untuk memperoleh gambaran tentang pengawasan atas penerapan SIMDA Keuangan maka dibutuhkan pengalaman pegawai tentang kegagalan sistem yang pernah terjadi. Hal ini tercantum pada wawancara terhadap Ibu Mardiana S.Sos bagian perencanaan dan keuangan dengan pertanyaan Apakah SIMDA keuangan dikantor ini pernah mengalami kegagalan sistem? Hasil dari wawancara sebagai berikut :

“sebenarnya sih bukan kegagalan tetapi terkadang program ini error kadang kayak heng hanya gangguan teknis saja”

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pengawasan/penerapan SIMDA Keuangan dari atasan sering dilakukan agar terkontrol dengan baik dan sistem simda itu tidak pernah mengalami kegagalan hanya saja gangguan teknis saja seperti lambat loading/heng. Hal ini sejalan dengan penelitian Haryati Saleh Ramesa (2015) yang menyatakan terdapat struktur birokrasi yang baik khususnya terhadap pengawasan sehingga dapat mencegah terjadinya kegagalan terhadap SIMDA keuangan, dan adanya pengadaan server cadangan untuk mengantisipasi kegagalan yang disebabkan oleh sistem.

4. Kualitas informasi penerapan SIMDA Keuangan

Bagaimanapun idealnya sebuah aransemen kebijakan, jika output yang dihasilkan dari sebuah penerapan tidak sesuai dengan manfaat yang diharapkan maka kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan baik dan dapat dianggap gagal. Dari hasil penelitian pada BAPPEDA Gowa, dengan pertanyaan Bagaimana kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapan SIMDA Keuangan di kantor ini khususnya Akurasi, Ketepatan waktu, dan Relevan? terhadap Ibu Mardiana S.Sos ditemukan berbagai beberapa karakteristik kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapan SIMDA Keuangan yaitu:

1. Ketepatan Waktu

“setelah diterapkannya SIMDA Keuangan ini, setiap staf yang bertanggungjawab untuk menyajikan laporan keuangan menjadi termotivasi untuk melaksanakan tugasnya masing-masing karena mereka merasa terbantu dengan adanya sistem ini, dan penyajian laporan akhirnya tidak pernah terlambat sejak diterapkannya sistem ini”

2. Akurasi

‘sejauh ini tidak pernah ada keluhan dari SKPD lain tentang sistem ini, ekspor-import data juga lancar-lancar saja, itu kan berarti laporan kita tidak bermasalah”

3. Relevan

“ini sudah jelas relevan karena setiap transaksi dikelompokkan menurut jenisnya masing-masing, dan itu sudah terprogram langsung dalam sistem ini, kita hanya menginput data kedalam sistem, dan sistem yang mengolahnya”

Hasil wawancara tersebut sejalan dengan definisi kualitas informasi menurut Agus Mulyanto (2010). Menurut Agus Mulyanto (2010) ketepatan waktu yaitu informasi yang dihasilkan dari suatu proses pengolahan data, datangnya tidak boleh terlambat (using). Informasi yang terlambat tidak akan mempunyai nilai yang baik, karena informasi merupakan landasan dalam pengambilan keputusan. Kesalahan dalam pengambilan keputusan akan berakibat fatal bagi organisasi. Menurut Agus Mulyanto (2010) informasi dikatakan akurasi yaitu informasi harus jelas mencerminkan maksud yang disampaikan dan harus bebas dari kesalahan-kesalahan. Menurut Agus Mulyanto (2010) informasi dikatakan berkualitas jika

relevan bagi pemakainya. Informasi akan relevan jika memberikan manfaat bagi pemakainya.

Ungkapan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa tingkat kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapan SIMDA Keuangan pada BAPPEDA Gowa sudah sesuai dengan teori Agus Mulyanto. Tertundanya penyajian laporan keuangan yang diakibatkan oleh kegagalan sistem hampir tidak pernah terjadi, justru pegawai menjadi termotivasi dengan adanya sistem ini karena sangat membantu dalam proses penyajian laporan keuangan. Setiap bagian dalam sistem bekerja secara integritas dan saling berhubungan satu sama lain, setiap transaksi dikelompokkan secara otomatis menurut jenisnya masing-masing oleh sistem, sehingga pegawai hanya bertugas untuk menginput data kedalam sistem. Setiap laporan yang ditransfer ke SKPD lain membuktikan bahwa sistem ini telah bekerja dengan baik.

5. Efektivitas Penerapan SIMDA keuangan.

SIMDA Keuangan adalah sistem komputerisasi yang dirancang untuk membantu proses pengolahan dt keuangan pada pemerintah daerah. Secara umum pegawai yang terkait dengan proses pengoperasian SIMDA Keuangan pada BAPPEDA Kabupaten Gowa telah mengerti dan paham tentang tujuan dan penerapan SIMDA Keuangan. Hal ini membuktikan bahwa pegawai merasa terbantu dengan adanya sistem ini dan bisa dikatakan sistem ini efektif dalam penerapannya. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara terhadap Ibu Mardiana S.Sos bagian perencanaan dan keuangan dengan pertanyaan Apakah penerapan SIMDA

Keuangan dikantor ini sudah efektif atau tidak? Hasil dari wawancara sebagai berikut:

“program ini sangat efektif dan lebih akurat karena seperti yang dijelaskan tadi dengan adanya SIMDA Keuangan penyajian laporan keuangan berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan ”

Hasil dari wawancara tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Aulia Lorie Pengestika (2016), bahwa SIMDA adalah sebuah aplikasi computer untuk mengolah keuangan daerah, SIMDA mengolah laporan keuangan daerah, SIMDA membuat pengelolaan keuangan daerah lebih cepat dan lebih efektif, tidak perlu diulang untuk pembuatan laporan keuangan, kita tinggal input lalu SIMDA bekerja secara otomatis itu lebih memudahkan pegawai dalam pengoperasian SIMDA Keuangan. Kesimpulan penulis tentang jawaban dan acuan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Aulia Lorie Pangestika (2016) sudah sesuai karena pengelolaan keuangan lebih cepat akurat dan lebih efektif dengan memakai SIMDA sebagaimana SIMDA menurut BPKP adalah program aplikasi pengolah data yang terintegrasi.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil analisis terhadap kondisi yang dijumpai dalam penelitian seperti dibahas dalam bab sebelumnya maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah faktor-faktor pendukung yang dimiliki oleh BAPPEDA Gowa untuk menerapkan SIMDA Keuangan secara efektif antara lain komunikasi aktif, sumber daya manusia, adanya sikap implementor yang menerima/setuju atas pelaksanaan penerapan SIMDA Keuangan serta dukungan dari kepala kantor/pimpinan, dan struktur birokrasi yang berperan dalam pengawasan atas jalannya sistem aplikasi komputerisasi SIMDA Keuangan. Selain itu, kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapan SIMDA Keuangan diantaranya ketepatan waktu, akurasi, dan juga relevan.

B. SARAN

1. BAPPEDA

Bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa agar lebih menjaga kualitas dan tetap mengikuti perkembangan aplikasi SIMDA karena itu sangat berguna dan sangat membantu pemerintah dalam pengelolaan aset daerah.

2. Bupati

- a. Perlunya pembinaan terhadap aparat pemerintahan sebagai langkah pemberdayaan kinerja aparat pemerintah Kabupaten Gowa dalam memberikan informasi yang relevan.
- b. Pemerintah daerah harus benar-benar memperhatikan arah pembangunan yang dilaksanakan, dengan cara lebih pro aktif dan lebih intens memberikan petunjuk dan evaluasi kinerja pemerintah.

3. DPRD Sulawesi Selatan

DPRD Sulawesi Selatan disarankan untuk secara proaktif dan menerima menampung dan menindaklanjuti temuan atau laporan masyarakat terkait dengan adanya dugaan penyimoangan penggunaan APBD oleh satuan kerja perangkat daerah.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Berdasarkan hasil penelitian, penelitian ini mempunyai saran untuk peneliti selanjutnya, diharapkan diperluas objek penelitian sehingga hasil penelitian ini lebih bisa mewakili secara keseluruhan.

Adapun saran yang dapat diajukan penulis sebagai hasil dari penelitian ini dalam rangka penerapan SIMDA Keuangan pada organisasi/instansi lain yang tertarik untuk menerapkan SIMDA Keuangan sebagai sistem komputerisasi pengolahan data keuangannya yaitu perlu pengembangan atas pemahaman pegawai tentang maksud dan tujuan dri penerapan SIMDA Keuangan serta

memahami faktor-faktor pendukung apa yang perlu dimiliki oleh setiap instansi untuk dapat menerapkan SIMDA Keuangan seperti yang dimiliki oleh BAPPEDA Gowa baik dalam hal komunikasi, pengembangan sumber daya manusia dan yang paling penting adalah sikap dari para implementor serta komitmen pemimpin dan pengawasan. Hal ini yang turut mendukung penerapan SIMDA Keuangan sehingga mampu menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas, laporan keuangan dapat disajikan tepat waktu serta dapat diandalkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Dian M, Mitami.2013. Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.
- Deisi, Natalia Lumintang. 2015. Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado.
- Edward, George C.2011. *Implementing Public Policy*, Washington
- Erwin.2016. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA), Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Aparatur dan Ketataatan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Wilayah Maluku Utara. Fakultas Ekonomi Universitas Khairun.
- Harbelubun, Astuti Veronika Laura, dkk. 2010. Analisis Penggunaan Aplikasi SIMDA Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Di Kabupaten Maluku Tenggara. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi.
- Hartono, Yogi, Dkk.2016. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Terhadap Efektifitas Pelaporan Keuangan. Malang: Jurnal Ilmu Administrasi Publik.
- Hartono Bambang. 2013. Sistem Informasi Manajemen . Yogyakarta.
- Lorie Aulia Pangestika, dkk. 2016. Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tegal. Politeknik Harapan Bersama Tegal.
- Mulyanto Agus. 2010. Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi. Yogyakarta. Pustaka pelajar.
- Mardiasno. 2011. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mcleod, Raymond . 2010. Sistem Informasi Manajemen. Jakarta: Salemba Empat.

- Permendagri 13 tentang tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 2009. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Ratna, P.Ayu Dewi.2014. Pengaruh Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKAD) Pada Kualitas Laporan Keuangan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Udayana.
- Saleh Haryati Ramesa.2015. Analisis Faktor-Faktor Pendukung Dan Kualitas Informasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Pada Pemerintah Kota Kendari. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran.
- Sutanto, Azhar.2010. *Sistem Informasi Manajemen* .Bandung: Linggar Jaya.
- Widuri.2010. (<https://widuri.raharia.info/index.php/KP1112469591>) Diakses pada tanggal 28 Februari 2019





DAFTAR WAWANCARA

Pertanyaan

SIMDA

1. Apa tujuan dari pengelolaan keuangan ?
2. Apa yang anda ketahui tentang SIMDA ?
3. Apa tujuan penerapan SIMDA ?
4. Bagaimana proses pelaksanaan kerja SIMDA keuangan, bisa dijelaskan dari tahap proses penginputan?
5. Bagaimana komunikasi antara pimpinan dan staf mengenai penerapan SIMDA keuangan di kantor ini?
6. Bagaimana peningkatan kualitas SDM khususnya dalam proses pengoperasian SIMDA keuangan dikantor ini?
7. Bagaimana respon pegawai atas penerapan SIMDA Keuangan.
8. Bagaimana tingkat pengawasan dalam proses pelaksanaan penerapan SIMDA Keuangan dikantor ini ?
9. Apakah SIMDA keuangan dikantor ini pernah mengalami kegagalan sistem?
10. Bagaimana kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapan SIMDA Keuangan di kantor ini khususnya Akurasi, Keteepatan waktu, dan Relevan.
11. Apakah penerapan SIMDA Keuangan dikantor ini sudah efektif atau tidak?

DOKUMENTASI



BIOGRAFI PENULIS



Hastita Novi Damris panggilan Tita lahir di Bira pada Tanggal 17 November 1997 dari pasangan suami istri Bapak Damris dan Ibu Hasna. Peneliti adalah anak pertama dari tiga bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Jl. Pemuda Birakeke Desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba. Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu SDN 165 Bira lulus Tahun 2010, SMP Negeri 34 Bulukumba lulus Tahun 2012, SMA Negeri 3 Bulukumba lulus Tahun 2015, dan mulai tahun 2015 mengikuti program S1 Akuntansi di Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai sekarang tahun 2019. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH).